

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh :

Nama : Suriati
NIM : D01303059
Judul : Telaah Konsep Nasionalisme Pendidikan Soekarno Dalam Perspektif
Pendidikan Islam Di Indonesia

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 14 Juli 2009

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Kadir, MA
NIP. 195308031989031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Suriati ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.

Surabaya, 12 Agustus 2009

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Nur Hamim, M.Ag
NIP.196203121991031002

Ketua,

Dr. H. Abdul Kadir, MA
NIP.195308031989031001

Sekretaris

Drs. Nuril Huda, M.Pd
NIP. 198006272008011006

Penguji 1

Drs. H. Moch. Tolchah, M.Ag
NIP. 195303051986031001

Penguji II

Drs. H. Syaiful Jazil, M.Ag
NIP. 196912121993031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad 21 merupakan masa kejayaan bagi era globalisasi. Sebuah era yang mencoba menjadikan dunia, khususnya dunia yang tergabung dalam kategori dunia ketiga (berkembang) seperti Indonesia untuk secara cermat dan tegas menyikapi segala efek yang ditimbulkannya.

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia. setidaknya, ada tiga hal yang sering ditemukan dalam mendefinisikan globalisasi, yakni kesalinghubungan, integrasi dan kesalingterkaitan.¹Dengan pengertian yang demikian, maka globalisasi dengan prinsip kesalinghubungan boleh dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam suatu era dimana sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses - proses global.

Selain konsep Kesalinghubungan, konsep kedua yang sering muncul dalam definisi - definisi globalisasi adalah Integrasi. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Amal bahwa globalisasi merupakan proses munculnya

¹ Thomas I friedman, *lexus dan pohon zaitun*,(Bandung :Penerbit Itb.2002),dikutip oleh Budi Winarno, *Globalisasi, wujud imperialism baru*,(Yogyakarta : tajidupress.2005) hlm.39

masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan melampaui batas - batas negara, baik menyangkut ideologi maupun lembaga - lembaga politik dunia.²

Konsep yang ketiga adalah Interdependensi. Definisi ini mencakup pengertian bahwa suatu peristiwa yang sedang berlangsung di satu negara dapat berpengaruh terhadap negara lain. Seperti halnya, ketidakstabilan politik di Iraq dengan wujud peperangan yang tidak kunjung reda. Hal itu menyebabkan negara - negara lain khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim mencoba melakukan pembelaan, baik secara terang- terangan seperti pengiriman sukarelawan maupun secara halus melalui propaganda media tulis dan elektronik serta pemboikotan produk - produk Amerika dan Sekutunya oleh kelompok tertentu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas terhadap sesama manusia, terlebih sesama muslim meski berbeda wilayah.

Pada tataran praksisnya, globalisasi memiliki efek positif yang signifikan. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur , bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Sementara, dilihat dari sudut pandang sosial budaya, melalui globalisasi, bangsa Indonesia dapat meniru pola

² Ichsanul amal, *Globalisasi, demokrasi dan wawasan nusantara : perspektif pembangunan jangka panjang dalam wawasan nusantara Indonesia menghadapi globalisasi, pusat kajian kebudayaan Universitas Bung Hatta*.1992) hlm.1

berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme bangsa terhadap Indonesia tercinta. selain itu, ditilik dari sisi teknologi komunikasi, kendala ruang dan waktu, walau pun belum seluruhnya, kini praktis bukan lagi merupakan hambatan yang terlalu besar bagi umat manusia. Sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah pelosok dalam suatu negara tertentu, kini dapat dengan mudah diikuti secara langsung dari berbagai wilayah lainnya. Dengan atau tanpa kabel, komunikasi antar berbagai lokasi di muka bumi kini dapat dilakukan dengan mudah. Pendek kata, dilihat dari segi kelancaran dan penghilangan sekat-sekat komunikasi, globalisasi memang tampil mencengangkan dan patut disambut dengan penuh antusias.³

Kendati demikian, layaknya dua sisi mata uang, selain memberi kontribusi positif, globalisasi juga ditengarai memberi dampak negatif yang signifikan. Globalisasi secara terselubung telah mencoba memarginalkan peran rakyat miskin Indonesia. Bila dikaji secara cermat, secara ekonomi dan budaya, globalisasi tidak dapat begitu saja dipandang sebagai sebuah gejala alamiah yang netral. Ia sarat dengan kepentingan dan muslihat, khususnya yang mendatangkan keuntungan bagi para pemodal (kapital) yang berasal dari negara-negara kaya tertentu. Jika dilihat dari sudut negara-negara miskin, meskipun kelompok masyarakat lapisan

³ Krsna, *pengaruh globalisasi terhadap prularisme kebudayaan manusia di Negara berkembang*.internet@yahoo.com.2005

atas di negara-negara miskin turut memperoleh manfaat dari globalisasi, kaum pekerja, petani, dan masyarakat miskin kota di negara-negara miskin cenderung menghadapi ancaman yang makin serius dari perkembangan globalisasi. Sedangkan, dipandang dari segi ideologi, Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Ditilik dari sisi moral, Masyarakat Indonesia, khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Selanjutnya, diteropong dari sudut pandang sosial, globalisasi Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Hal yang paling menyedihkan dari sekian dampak buruk globalisasi adalah Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Hal ini pada taraf selanjutnya, akan mampu merobohkan semangat kebersamaan dan nasionalisme bangsa Indonesia terhadap sesama maupun terhadap negara Indonesia. Sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia yang telah dengan susah payah dibangun oleh para leluhur bangsa.⁴

Oleh karena itu, mudah dimengerti bila sejumlah kalangan sepakat menentang globalisasi dengan sengit. Sebagaimana dilakukan Petras dan Veltmeyer (2001), konsep globalisasi dalam pandangan mereka tidak lebih dari sebuah muslihat untuk mengaburkan maksud sesungguhnya yang ingin diwujudkan melalui penyebarluasan dan pelaksanaan konsep tersebut. Dalam pandangan mereka, konsep imperialisme jauh lebih mampu menjelaskan fenomena yang berlangsung di balik selimut konsep globalisasi itu.⁵

Kesimpulan itu tidak beda dengan yang dikemukakan oleh Syaikh Fathi Muhammad Salim, seorang ulama dan pemikir terkemuka dalam bukunya *Al-'Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah 'Ala Al-'Alam*, yang berarti: globalisasi adalah alat kapitalisme modern untuk menguasai dunia. Dalam kitab itu Syaikh Salim pertama-tama mendeskripsikan realitas globalisasi dengan menyatakan, "Pengertian globalisasi ringkasnya adalah: suatu proses memudarnya tapal batas antar negara-negara baik secara ekonomi, budaya, ideologi, maupun sosial, serta kondisi dunia global yang menjadi bagaikan kampung kecil di hadapan hegemoni kapitalisme, dengan sistem ekonominya yang penuh dengan keburukan, kezaliman, kerakusan, dan eksploitasi, juga sistem

⁴ *Op cit.*,

⁵ Budi winarno, *glopbalisasi, wujud imperialism baru peran Negara dalam pembangunan*,(Yogyakarta: tajidupress.2005),hlm.40

pemikirannya yang destruktif terhadap berbagai ideologi, moral, dan nilai lain."⁶ Syaikh Salim kemudian mendefinisikan globalisasi dengan redaksi lain. Fokusnya adalah pada dua dimensi, yaitu dimensi ideologi dan ekonomi. Dalam dimensi ideologi, Syaikh Salim menegaskan, "Globalisasi adalah suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus dianut oleh semua bangsa secara sukarela atau terpaksa, serta pemaksaan peradaban Barat dan nilai-nilainya kepada dunia." Sementara dalam dimensi ekonomi, Syaikh Salim mengatakan, "Globalisasi adalah proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekonomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu.". Jadi, apa substansi globalisasi? Syaikh Salim kemudian menyimpulkan, "*Fa-hiya bi ikhtishar isti'mar jadid*" (Jadi, globalisasi ringkasnya adalah imperialisme baru).⁷

Mengutip pendapat salah seorang peraih nobel bidang ekonomi 2001, Joseph E Stiglitz, bahwa Globalisasi ekonomi, disamping membuat orang – orang

⁶ Syaikh fathi salim, *Al aulamah hiya Adah Ar ra'sumaliyah al haditsah li as saitharah 'ala al a'lam*, dikutip oleh Muhammad Ismail Yusanto, *Islam, nasionalisme dan tantangan global*, <http://www.surabayapost.co.id>.2009

⁷ *Ibid.*,

miskin mampu memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dari Negara – Negara maju, juga menimbulkan ketidakadilan negara – Negara maju terhadap Negara – Negara berkembang dalam kerangka perdagangan bebas. Disatu sisi, negara – Negara barat telah memaksa negara – Negara miskin untuk menghapuskan hambatan perdagangan, namun tetap mempertahankan hambatan perdagangan mereka sendiri. Mencegah negara – negara berkembang mengekspor hasil pertanian mereka dan akibatnya mengurangi pendapatan ekspor yang sangat mereka butuhkan.⁸

Masih menurut Stiglitz, faktanya, globalisasi hanya menguntungkan negara-negara industri kaya. Sementara hanya sedikit negara berkembang (itu pun hanya segelintir penduduknya) yang mendapatkan manfaat globalisasi. Dia menegaskan bahwa pemenang globalisasi adalah negara-negara industri (lama dan baru), sementara sebagian besar negara berkembang menjadi pecundang.

Laporan *United Nations Human Development* tahun 1999 menyebutkan, seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86 % semua barang dan jasa. Sedangkan seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. Seperlima yang terkaya juga menikmati 82 % perdagangan dan 68 %

⁸ Joseph E Stiglitz, *Gobalisasi dan kegagalan lembaga- lembaga keuangan internasional(terj)* dikutip oleh Adhyaksa dault, *Islam dan nasionalisme*,(Jakarta:L PUSTAKA AL KAUTSAR.2005) hlm.121

Investasi Asing Langsung (*FDI=Foreign Direct Investment*), sedang seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit.⁹

Data kesenjangan tahun 1999 ini tidak banyak berubah jika dibanding data tahun 1980 ketika globalisasi mulai beroperasi dengan neoliberalismenya, saat Margaret Thatcher dan kemudian Ronald Reagan menduduki kursi kekuasaan. Robert H. Strahm menggambarkan data tahun 1980 dengan berkata, "Kita hidup dalam sebuah dunia, di mana 26 % penduduknya (di negara-negara industri Blok Barat dan Blok Timur) menguasai lebih dari 78 % produksi, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk dunia di negara-negara berkembang (Afrika, Asia, dan Amerika Latin) hanya mendapat seperlima produksi dan kekayaan dunia".¹⁰

Walhasil, di satu sisi, globalisasi memang sangat menguntungkan negara-negara kapitalis, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional (*MNCs=multinational corporations*). Menurut catatan Duncan McLaren dan Willmore, pada tahun 2003 lima ratus perusahaan multinasional mengontrol hampir dua pertiga perdagangan dunia. Bahkan lima perusahaan multinasional terbesar dunia secara bersama-sama menghasilkan angka penjualan tahunan yang lebih besar dibanding pendapatan 46 negara termiskin di dunia.¹¹ Pada tahun 1999, hasil penjualan dari lima korporasi papan atas (General Motors, Wal-Mart, Exxon-Mobil, Ford Motor,

⁹ International forum of globalization, *globalisasi kemiskinan dan ketimpangan*. Penerj. A. Widyamartaya @ Ab. Widyanta. (yogyakarta: cindelarastore.com, 2004), hlm.31

¹⁰ H Rudolf Strahm, *kemuiskinan dunia ketiga: menelaah kegagalan di negeri berkembang (warum sie so arm said)* penerj. Rudy Baginbo dkk. (Jakarta : PT pustaka Cidesindo. 1999), hlm.3

¹¹ Nanang Pamuji Sejati & Martanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme* (Yogyakarta: Fisipol UGM.2006), hlm.72

dan Daimler-Chrysler) lebih besar dibanding GDP (Gross Domestic Product) 182 negara.¹²

Namun di sisi lain, globalisasi hanya menghasilkan kemiskinan untuk negara-negara berkembang. Pada pertengahan 1990-an, dengan standar kemiskinan ekstrim yakni konsumsi sebesar satu dolar AS per hari, kurang lebih 33 % penduduk negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah itu, 550 juta jiwa ada di Asia Selatan, 215 juta jiwa ada di Sub-Sahara Afrika, dan 150 juta jiwa di Amerika Latin Castel dikutip oleh Sejati & Martanto dalam kritik globalisasi dan neoliberalisme.¹³

Kesenjangan kaya miskin sebagai akibat globalisasi juga dapat dilihat dari data yang memilukan berikut. Untuk perbaikan pendidikan dasar di seluruh negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja komestik di AS saja. Untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang, diperlukan 9 miliar USD setahun, lebih kecil dari dana konsumsi es krim di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi, seluruh negara berkembang perlu 13 miliar USD setahun, lebih kecil dibanding dana untuk pakan hewan piaraan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang besarnya 17 miliar USD setahun.¹⁴ Itulah hakikat globalisasi yang jahat, yaitu neo

¹² International forum of globalization, *op cit*, hlm.41

¹³ Nanang pamuji sejati & Martanto, *op.,cit*, hlm.75

¹⁴ M. Amin Rais, *Agenda mendesak bangsa selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK press.2008), hlm.22

imperialisme negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi negara-negara berkembang. Globalisasi adalah penghasil kemiskinan.

Bagi umat Islam, globalisasi memang sangat berbahaya. Dan bahayanya tidak hanya dirasakan dari sudut ekonomi, seperti kemiskinan, tapi juga secara ideologi, yakni terancamnya orisinalitas ajaran Islam. Contohnya adalah penyelenggaraan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) oleh PBB di Kairo, September 1994. Konferensi itu berusaha melegalkan zina, homoseksual, lesbianisme, aborsi. Padahal semua itu haram menurut Islam.¹⁵ Contoh lainnya adalah bagaimana agen-agen globalisasi juga merusak ajaran Islam lewat pendidikan. Di negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Mesir, dan lain-lain telah dilakukan perubahan kurikulum Islam dengan dalih perkembangan jaman. Arab Saudi mengubah materi *al-wala` wa al-bara`* (loyalitas dan disloyalitas). Sementara Yordania, Mesir, dan Kuwait mengubah materi tentang jihad dan perang melawan kafir agresor, seperti Yahudi dan Nasrani. Negara-negara itu juga mengubah konsep-konsep Islam yang dibenci AS.

Berdasar beberapa uraian tersebut, muncul persoalan pelik yang perlu dituntaskan, yaitu posisi nasionalisme bangsa. Sebuah ideologi kebangsaan yang berbasis kecintaan terhadap tanah air dan bangsa yang memperoleh ancaman serius dari kuatnya jaring globalisasi. Bagaimana kelangsungan hidup sebuah

¹⁵ Muhammad Nuruddin Usman, *menanti detik – detik kematian barat*, (Solo : Erta Intermedia.2003), hlm.262-263

tanah airnya yang memberikan sumber kehidupan sebagai anugerah Allah SWT. Sehingga setiap wujud hasil alam harus dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya untuk kesejahteraan bersama sebagai suatu bangsa. Dalam prosesnya, setiap individu yang mencoba menggali dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia mencoba menanggalkan identitas kesukuan, agama, ras maupun bahasa demi sebuah kerjasama mencapai kesejahteraan.

Sejenak menilik dari dimensi sejarah, kerjasama antar bangsa dengan semangat kebersamaannya, berjuang sekuat tenaga untuk bisa menghirup udara kebebasan, lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kobaran semangat itulah yang pada akhirnya berhasil membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaan 64 tahun silam. Maka, Indonesia sebagai bangsa yang memiliki semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, tidak semestinya melupakan sejarah yang telah membesarkannya.

Betapa pilu hati para pengobar semangat nasionalisme Indonesia. Para nasioalis yang tergabung dalam barisan **Boedi Oetomo** sebagai pendobrak semangat nasionalisme bangsa Indonesia kala itu. Tercatat dalam sejarah, salah satu bapak nasionalisme Indonesia adalah Soekarno. Melalui pidato – pidato yang disampaikan maupun tulisan – tulisan yang termuat pada surat kabar, serta beberapa catatan korespondensinya. Dari situ, Soekarno ingin menegaskan bahwa sebagai bangsa yang sama – sama senasib yaitu berada pada belenggu penjajahan bangsa asing, maka bangsa Indonesia semestinya bisa menghidupkan semangat kebangsaan demi mencapai kemerdekaan.

Berada pada era globalisasi, nasionalisme tentu saja memiliki mantra tersendiri untuk menyikapinya. Soekarno, Beberapa puluh tahun lalu telah memprediksinya, karena itu merupakan keniscayaan perjalanan jaman. Hingga menurut Soekarno, salah satu strategi untuk menghadapinya adalah melalui pendidikan. Hal pertama yang perlu dirubah tentu saja adalah perubahan paradigma tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan harus dilaksanakan secara total. Tidak hanya mendominankan pencapaian ranah kognitif melainkan juga pengembangan ranah afektif dan psikomotorik.. Nasionalisme pendidikan Soekarno yang sarat akan nilai-nilai pembelajaran universal, tentunya harus senantiasa dikaji dari berbagai dimensi agar nantinya tidak terjadi keberpihakan maupun pengkebirian sejarah sekaligus menghindari kesalahpahaman dan pengkaburan pemaknaan Nasionalisme pendidikan Soekarno. Lebih dari itu, dalam upaya menghimpun strategi menghadapi globalisasi yang dimulai dari ranah pendidikan, Soekarno melalui pemikiran nasionalime pendidikannya, menawarkan beberapa gagasan yang perlu dikaji secara mendalam.

Sementara Islam adalah salah satu agama yang sangat menghendaki adanya persatuan dan kesatuan antar umat manusia. Menganjurkan umatnya untuk Mencintai dan bekerja untuk negeri yang didiami. Dilihat dari dimensi visi antara nasionalisme pendidikan Soekarno dengan Pendidikan Islam dalam konteks keindonesiaan, maka terbentuklah sebuah sinkronisasi antara keduanya. Sehingga, demi meneliti dan mengkaji pemikiran Nasionalisme Pendidikan

D. Definisi Operasional

Pada bagian ini penulis mencoba memberikan batasan-batasan yang terdapat pada judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi analisis tentang judul di atas.

Istilah hal yang perlu untuk diberi penjelasan meliputi:

1. Telaah

Telaah adalah penyelidikan, pemeriksaan, penelitian.¹⁷

2. Konsep

Konsep adalah rancangan atau seperangkat ide.¹⁸

3. Nasionalisme

Definisi nasionalisme pada dasarnya banyak sekali menurut konsep dan pemikiran masing-masing, namun hanya beberapa saja yang dapat penulis sebutkan, di antaranya:

- Nasionalisme adalah 1) paham untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri; sifat kenasionalan: - makin menjiwai bangsa Indonesia; 2) kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.¹⁹
- Nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan

¹⁷ Drs. Djalinus Syah,dkk, kamus pelajar "*kata serapan Bahasa Indonesia*"(jalkarta: Rineka cipta.1993)hlm.84

¹⁸ *Ibid.*,hlm.242

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.2005) hlm.610

tercinta, serta meningkatkan sumber daya bangsa yang dinilai masih rendah . Karakter keterbukaan pada pembaharuan memungkinkan bangsa Indonesia mampu menyerap pengetahuan dari Negara – Negara maju demi peningkatan kualitas bangsa Indonesia di segala bidang.

2. Bila di telaah lebih dalam, nasionalisme pendidikan Soekarno bermuatan pendidikan humanisme dan nilai-nilai pembelajaran secara total. Bahwa untuk bisa menjadi bangsa yang maju dan berkualitas, maka pengembangan potensi baik akal, jiwa maupun fisik harus digalakkan. Konsep tersebut sangat selaras dengan tujuan Pendidikan Islam di Indonesia yaitu mengembangkan potensi siswa agar menjadi *insan kamil* (sempurna akal, jiwa maupun fisik).
3. Pendidikan Islam sebagai sub sistem Pendidikan Nasional mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga dalam rangka menumbuh kembangkan sikap nasionalisme tentunya harus didasari dengan pesan moral yang terdapat dalam pendidikan Islam.
4. Pendidikan Islam dengan berbagai ajaran yang bersifat normatif dan sarat muatan nilai-nilai kemanusiaan, mempunyai tanggung jawab sebagai pembimbing dan pengarah terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dengan satu pandangan bahwa anak didik adalah hamba Allah yang diberi anugerah berupa potensi dasar yang bisa berkembang dan tumbuh secara interaktif dengan pengaruh lingkungan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku).²⁶ Jenis penelitian ini sekedar membedakan dengan penelitian lapangan (*field research*).

Adapun penelitian ini adalah bersifat histories- factual, karena meneliti tentang tokoh dan pemikirannya, serta deskriptif – analisis yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme Pendidikan.²⁷ Serta Deskriptif-Analisis yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme Pendidikan.²⁸ Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik penulisan deskriptif. Hal ini dimaksudkan tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,1995) hlm.332

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2002) hlm.198

²⁸ *Ibid.*,

4. Teknik Penggalian Data

Tehnik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan tehnik analisa isi (*Content Analysis*), yaitu tehnik dengan menggunakan metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁹

Data yang diperlukan dalam studi kepustakaan ini digali dari sumbernya melalui riset kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari dan menelaah secara mendalam kandungan karya dari Soekarno, yang termuat dalam sumber primer. Adapun karya soekarno yang terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu konsep nasionalisme pendidikan soekarno adalah buku yang berjudul *Dibawah Bendera revolusi jilid 1*. Buku yang diterbitkan oleh panitya penerbit dibawah bendera revolusi pada tahun 1965. Buku setebal 627 hal ini memuat kumpulan pemikiran soekarno yang dimuat dalam surat kabar harian maupun berupa surat jawaban terhadap pemikiran tokoh terkait maupun surat - surat bermuatan pemikiran pendidikan yang ditujukan kepada A. Hassan, seorang pemimpin persatuan islam (persis) yang berlokasi di Bandung pada tahun 1930'an. Dari 627 hal tersebut, 48 sub bab diantaranya membahas tentang pemikiran nasionalisme pendidikan soekarno.

Di samping itu, peneliti juga mempelajari dan menelaah buku-buku

²⁹ Lexy J Meleong, *metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung : Remaja rosda karya.2002), hlm.163

dan tulisan-tulisan serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti, yaitu kajian – kajian yang mengulas tentang soekarno beserta pemikiran nasionalisme pendidikannya. Adapun buku – buku yang berkaitan dengan soekarno , terutama terkait dengan nasionalisme pendidikan soekarno adalah sebagai berikut:

- a. *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*, Sebuah buku karangan DR. badri yatim setebal 196 halaman ini mencoba mengetengahkan hasil kajian mengenai pemikiran islam dan nasionalisme pendidikan soekarno. Buku ini bertujuan untuk mengajak para pembaca agar lebih obyektif, kritis dan dialogis dalam memaknai tiap pemikiran nasi\onalisme soekarno, terutama yang terkait dengan nasionalisme pendidikan.
- b. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Sebuah karya Cindy Adams yang dengan lugas mengurai tentang figure soekarno melalui kutipan pernyataan – pernyataan soekarno sendiri. Buku ini terdiri dari 21 sub bab, dimana berisi tentang pemikiran politik soekarno, karakter soekarno maupun tentang pemikiarn nasionalisme soekarno termasuk tentanmg nasionalisme Soekarno.
- c. Nazarudin syamsudin dengan karyanya yang bertajuk *Soekarno, Pemikiran Politikj dan Kenyataan*. Buku ini terdiri dari 247 halaman dengan 6 sub bab, dimana *masing* – masing tema yang diangkat dalam 6 sub bab tersebut ditulis oleh 6 penulis pada masing - masing kajian.

Bab Kedua akan membahas tentang Pendidikan Islam dan Nasionalisme, yaitu pengertian dan latar belakang munculnya Nasionalisme serta uraian tentang dasar, tujuan, materi maupun kandungan Pendidikan Islam yang berkaitan dengan Nasionalisme.

Bab Ketiga, penulis akan memaparkan tinjauan secara umum tentang Soekarno dan konsep nasionalisme pendidikannya. Dan untuk mendukung hal tersebut akan dijelaskan dalam sub bab sebagai berikut: 1) Riwayat hidup Soekarno, 2) Rekonstruksi konsep nasionalisme pendidikan Soekarno.

Bab Empat: Pada bab ini akan dipaparkan tentang analisis konsep nasionalisme pendidikan Soekarno dalam perspektif Pendidikan Islam.

Bab Lima: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM DAN NASIONALISME PENDIDIKAN

A. Nasionalisme pendidikan Dalam Lintasan Sejarah

1. Pengertian Nasionalisme

Asal kata nasionalisme adalah *nation* yang berarti bangsa. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat-istiadat. Sedangkan dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.¹

Sedangkan mengenai nasionalisme sendiri banyak rumusan, diantaranya:

a. Hans Kohn

“Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan”.²

¹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu,1999), hlm.58

² Hans Kohn, *Nasionalisme, Arti Dan Sejarahnya*, (Jakarta: PT. Pembangunan,1984) hlm.11

b. Lothrop Stoddard

“Nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa, suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan dalam bentuk kebersamaan”.³

c. Nazaruddin Sjamsuddin

“Nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara”.⁴

d. Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan.⁵

Sementara menurut Sartono Kartodirjo, bahwa nasionalisme memuat tentang kesatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*quality*), demokrasi, kepribadian nasional serta prestasi kolektif.⁶ Jadi nasionalisme ialah suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi

³ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam* (t.p., t.p., t.t) hlm.137

⁴ Nazaruddin Syamsudin, (ed), *Soekarno Kenyataan Politik Dan Kenyataan Praktek* (Jakarta: CV. Rajawali,1988) hlm.37

⁵ *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid II Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka,1990)hlm.31

⁶ Sartono Kartodirjo, *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme Dan Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Kanisius,1999) hlm. 60

masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut dibutuhkan semangat patriot dan perikemanusiaan yang tinggi, serta demokratisasi dan kebebasan berfikir sehingga akan mampu menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat yang pluralis.

Sebagai paham kebangsaan, nasionalisme mengandung prinsip dan nilai – nilai pendidikan sebagai berikut:

a. Persatuan

Cinta tanah air berimplikasi pada setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya, sehingga muncul kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan inilah yang menurut Bung Hatta sebagai prinsip nasionalisme yang pertama.⁷ Kemudian prinsip ini pula yang memotivasi bangsa Indonesia untuk bersatu padu dan berlomba – lomba memajukan Indonesia melalui nilai – nilai pendidikan.

b. Pembebasan

Nasionalisme merupakan pengakuan kemerdekaan perseorangan dari kekuasaan atau pembebasan manusia dari penindasan perbudakan.⁸ Nasionalisme dalam konteks inilah yang akan membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas menuju manusia yang utuh.

⁷ *Ibid*, hlm.19

⁸ Hans Kohn, *op.cit*, hlm.22

Ketertindasan yang berawal dari rendahnya daya pikir dan wawasan yang bermuara pada rendahnya kualitas pendidikan, hingga mudah dipecundangi oleh bangsa asing.

c. Patriotisme

Patriotisme ialah semangat cinta tanah air; sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.⁹ Sehingga nasionalisme meliputi patriotisme.¹⁰

Watak nasionalisme adalah “watak pemerdekaan, pembebasan, pertolongan dan mengangkat kaum kecil dan miskin ke harkat-martabat kemanusiaan yang adil dan beradab”.¹¹ Dengan sendirinya posisi nasionalisme sangat strategis, yaitu sebagai pendorong dalam rangka membebaskan dari segala belenggu penindasan dan membangkitkan kasih yang senasib dan seperjuangan, menumbuhkan keberanian dan perasaan ingin melindungi terhadap sesama serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bangsa dan negara merupakan kesatuan komunitas masyarakat pluralis yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi yang diatur dalam sebuah sistem dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nasionalisme tidak dibatasi oleh suku, bahasa, agama,

⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm.737

¹⁰ Lyman Tower Sergeant, *Ideologi – Ideologi Politik Kontemporer*,(Jakarta: Erlangga, 1987) hlm.19

¹¹ YB, Mangunkusumo, *Republic Sekarang Sudah Berubah Jauh*. Dalam Eko Prasetyo,(eds), *Nasionalisme , Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996)hlm.125

daerah dan strata sosial. Nasionalisme memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.¹² Kemajemukan masyarakat bukanlah penghalang untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita dalam hidup bernegara ketika nasionalisme dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan yang pluralis. Dengan nasionalismelah masyarakat yang serba pluralis dapat bersatu padu dalam bingkai persamaan hak dan demokratisasi. Atau dalam bahasanya Ruslan Abdul Gani adalah Nasionalisme yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Perikemanusiaan yang berorientasi Internasionalisme, ber-Persatuan Indonesia yang patriotik, ber-Kerakyatan atau Demokrasi serta berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat.¹³

2. Latar Belakang Munculnya Nasionalisme

Nasionalisme muncul dan berkembang menjadi sebuah paham (*isme*) yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara, bermasyarakat dan berbudaya dipengaruhi oleh kondisi histori dan dinamika sosio kultural yang ada di masing-masing negara.

Pada mulanya unsur-unsur pokok nasionalisme itu terdiri atas persamaan-persamaan darah (keturunan), suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan agama, bahasa dan kebudayaan.¹⁴ Nasionalisme akan muncul ketika suatu kelompok suku yang hidup di suatu wilayah tertentu dan masih

¹² Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*,(Jakarta: Panitia Penerbit Dibaah Bendera Revolusi,1964) hlm.76

¹³ Lazuardi Adi Sage, *Sebuah Catatan Sudutpandang Siswono Tentang Nasionalisme Dan Islam*,(Jakarta: Citra Media,1996) hlm.64

¹⁴ Lazuardi adi sage, *loc.cit*

bersifat primordial berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari luar wilayah kehidupan mereka.¹⁵ Lambat laun ada unsur tambahan, yaitu dengan adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk memegang peranan dalam kelompok atau masyarakat (demokrasi politik dan demokrasi sosial) serta adanya persamaan kepentingan ekonomi.¹⁶ Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah nasionalisme modern. Dilihat dari sejarah perkembangannya, nasionalisme mula-mula muncul menjadi kekuatan penggerak di Eropa Barat dan Amerika Latin pada abad ke-18.¹⁷ Di Amerika Utara misalnya, bahwa nasionalisme lahir karena perluasan dibidang perdagangan kira-kira pada 1000. Ada pula yang berpendapat bahwa manifestasi nasionalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17, ketika terjadi revolusi Puritan.¹⁸ Namun dari beberapa pendapat tersebut dapat dijadikan asumsi bahwa munculnya nasionalisme berawal dari Barat (yang diistilahkan oleh Soekarno sebagai nasionalisme Barat)¹⁹ yang kemudian menyebar ke daerah-daerah jajahan. Dengan kalimat lain bahwa, “As a historical symptom, nationalism emerged as the response to a political, economic, social, and cultural context, particularly the one brought on by colonialism”.²⁰ Yaitu sebagai gejala

¹⁵ Decki Natalis Pigay Bik, *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Konflik Politik Di Papua*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2002)hlm.55

¹⁶ Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid11,*op.cit*,hlm.31

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Badri yatim, *op.cit*,hlm.64

¹⁹ Nazaruddin Sjamsuddin,(*ed*),*op.cit*, hlm.41

²⁰ Fuad Jabali And Ismatu Ropi(ed), *Islam And Islam Formation In Indonesia From Communicatarian To Organizational Communications*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu,2000) hlm.142

historis, munculnya nasionalisme merupakan respon terhadap suasana politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama respon terhadap penjajahan.

Di Indonesia, gerakan nasionalisme mulai bangkit pada tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi “Boedi Oetomo”. Hal ini serupa dengan yang ditulis oleh Charles Wolf. Jr., yaitu: *The formal nationalist movement in the Indies began in Java in 1908 with the organization of the Boedi Oetomo...*²¹ Namun bentuk nasionalisme yang berkembang pada saat itu kebanyakan masih bersifat kedaerahan kelompok, belum pada tataran kenegaraan.

Seperti halnya Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan wilayah Timur menurut pandangan Partha Chatterjee bahwa dalam hal pemikiran maupun gagasan kaum nasionalis tetap mengadopsi pemikiran Barat dalam usaha menemukan ideologi pasca kemerdekaan, yaitu nasionalisme yang bersifat antikolonialisme. Nasionalisme antikolonialisme memisahkan dunia materi dan dunia spirit yang membentuk institusi dan praktik sosial masyarakat pascakolonial. Dunia materi adalah "dunia luar" meliputi ekonomi, tata negara, serta sains dan teknologi. Dalam domain ini superioritas Barat harus diakui dan mau tidak mau harus dipelajari dan direplikasi oleh Timur. Dunia spirit, pada sisi lain, adalah sebuah "dunia dalam" yang membawa tanda esensial dari identitas budaya. Semakin besar

²¹ Charles Wolf Jr. *The Indonesian Story(The Birth, Growth And Structure Of The Indonesian Republic)*,(New York: The John Day Company, 1948)hlm.43

kemampuan Timur mengimitasi kemampuan Barat dalam dunia materi, semakin besar pula keharusan melestarikan perbedaan budaya spiritnya. Di domain spiritual inilah nasionalisme masyarakat pascakolonial mengklaim kedaulatan sepenuhnya terhadap pengaruh-pengaruh dari Barat.

Kendati demikian, Chatterjee menambahkan bahwa dunia spirit tidaklah statis, melainkan terus mengalami transformasi karena lewat media ini masyarakat pascakolonial dengan kreatif menghasilkan imajinasi tentang diri mereka yang berbeda dengan apa yang telah dibentuk oleh modernitas terhadap masyarakat Barat. Hasil dari pendaulatan dunia spiritual ini membentuk sebuah kombinasi unik antara spiritualitas Timur dengan materialitas Barat yang mendorong masyarakat pascakolonial memproklamasikan budaya "modern" mereka yang berbeda dari Barat.

Dikotomi antara dunia spirit dan dunia material seperti yang dijelaskan Chatterjee pada satu sisi mengikuti paradigma Cartesian tentang terpisahnya raga dan jiwa. Namun, di sisi lain ia menunjukkan bahwa penekanan dunia spirit dalam masyarakat pascakolonial adalah bentuk respons mereka terhadap penganaktirian dunia spirit oleh peradaban Barat. Karena itu, masyarakat pascakolonial mencoba mengambil peluang tersebut untuk membangun sebuah jati diri yang autentik dan berakar pada apa yang telah mereka miliki jauh sebelumnya. Hasilnya berupa bangunan materi modernitas yang dibungkus oleh semangat spiritualitas Timur. Implikasi strategi ini dalam bangunan nasionalisme pascakolonial dapat dilihat dari upaya-upaya kaum

elite nasionalis membangun sebuah ideologi nasionalisme yang memiliki kandungan spiritual yang tinggi sebagai representasi kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh peradaban Barat.²²

Orientasi spiritualitas Timur mengilhami lahirnya konsep Pancasila yang dilontarkan oleh Soekarno kali pertama dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengklaim bahwa Pancasila bukan hasil kreasi dirinya, melainkan sebuah konsep yang berakar pada budaya masyarakat Indonesia yang terkubur selama 350 tahun masa penjajahan. Bagi Soekarno, tugasnya hanya menggali Pancasila dari bumi pertiwi dan mempersembahkannya untuk masyarakat Indonesia. Argumen tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia sebagai sebuah model nasionalisme masyarakat pascakolonial jauh lebih kompleks dan ambivalen baik dari kategorisasi. Artinya, domain spiritual dalam nasionalisme Indonesia bagaimanapun diisi oleh elemen-elemen yang melekat erat pada dan lahir dari proses dialektis dengan kolonialisme. Mengklaim bahwa nasionalisme Indonesia berakar secara "alami" pada budaya lokal masih belum sepenuhnya tepat memiliki landasan historis.

Selain itu, menurut kaca mata keagamaan, Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki cara pandang tersendiri. Sebagaimana kaum nasionalis muslim yang bergerak dan bersatu

²² Sulfikar Amin, *Epistemologi Nasionalisme Dalam*
<http://www.syarikat.org/tracback/03/11/2004>

dalam ruang organisasi keislaman berupa Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto. Pada dasarnya, pemikiran maupun pergerakan mereka adalah mencoba mengaplikasikan pemikiran yang bersumber pada Islam yaitu Alquran dan Hadits yang notabene menyeru pada persatuan dan anti bercerai berai antar umat manusia. Dalam Islam, kebangsaan atau cinta tanah air adalah merupakan sebagian dari Iman, sebagaimana doktrin *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air merupakan bagian dari iman).²³ Sebagai kepercayaan, Islam menentang semangat memusuhi bangsa lain, dan sikap yang demikian ini merupakan ciri nasionalisme.²⁴ Bukan tanpa alasan mengapa Tjokroaminoto maupun nasionalis muslim lain berkeyakinan dan berprinsip demikian, karena jauh sebelum nasionalisme menggapai bumi Indonesia, di beberapa negara Islam nasionalisme sudah terlebih dulu diterapkan.

Di beberapa negara Islam, gerakan nasionalisme terjadi pada penghujung abad ke – 19, dimana sebagian besar wilayah Islam sudah di bawah kekuasaan Barat Kristen, baik di bidang ekonomi, militer maupun politik yang mengakibatkan runtuhnya susunan politik Islam yang tradisional yang kemudian terjadilah perlawanan untuk menentang intervensi Kolonialis tersebut. Diantaranya adalah munculnya para tokoh gerakan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, dengan seruannya menentang imperialisme dan

²³ Lazuardi adi sage, *Op. Cit.* hlm.77

²⁴ Hazem Zaki Nusaibeh, *Gagasan – Gagasan Nasionalisme Arab*,(Jakarta: Bhratara, 1969), hlm.17

mengusahakan kebebasan, meningkatkan kesadaran intelektual yang berakar pada sikap kembali kepada Islam .²⁵ Dalam perkembangannya, nasionalisme yang muncul di berbagai negara tersebut secara tidak langsung mengilhami bentuk-bentuk ideologi sekaligus dijadikan sebagai falsafah kenegaraan. Sehingga cinta tanah air tidak hanya sebatas merebut dan mempertahankan kemerdekaan melainkan juga mempunyai banyak nilai – nilai luhur yang bernilai pendidikan. Dengan adanya akar nasionalisme sebagai rasa cinta tanah air, maka disitu pula akan tumbuh sikap patriotisme, rasa kebersamaan, kebebasan, kemanusiaan dan sebagainya. Karena nasionalisme dibangun oleh kesadaran sejarah, cinta tanah air, dan cita-cita politik. Nasionalisme menjadi faktor penentu yang mengikat semangat serta loyalitas untuk mewujudkan cita-cita setiap negara.²⁶

3. Nasionalisme Pendidikan

Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme telah melahirkan banyak negara dan bangsa merdeka di seluruh dunia. Hal ini antara lain, disebabkan karena nasionalisme telah memainkan peranan yang sangat penting dan positif didalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai demokrasi, yang oleh karena itu negara bangsa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan kemakmuran dan peningkatan kualitas pendidikan rakyat.

²⁵ John I. Esposito, *Islam Dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang,1990) hlm.82

²⁶ Dwi purwoko,(eds), *Negara Islam(?)*, Jakarta: PT. Permata Artitika Kreasi, 2001), hlm.36

Menyinggung masalah pendidikan, bahwa kualitas pendidikan sangatlah berpengaruh pada proses hidup dan kehidupan manusia.²⁷ Seperti ungkapan pepatah bahwa sepanjang hidup adalah pendidikan (life long education). Maka kehidupan manusia adalah persoalan pendidikan untuk menjadi manusia seutuhnya.

Sampai detik ini, masalah pendidikan tetap menjadi persoalan manusia dan bangsa manapun. Jika pendidikan sedang mengalami krisis, berarti semua orang atau bangsa di dunia ini juga mengalami krisis kependidikan yang nantinya berimbas pada terjadinya krisis multidimensi. Secara filosofis, jika ada seseorang yang menderita kemiskinan, sementara manusia lainnya mengalami kemakmuran, maka dapat dipastikan bahwa pihak pertama merupakan akibat dan pihak kedua berposisi sebagai penyebab.²⁸ Padahal pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dibekali dengan kecerdasan spiritual, intelektual maupun moral hingga berpotensi untuk menjadi makhluk yang sempurna. Sehingga harus ada keseimbangan antar manusia yang tersusun dalam satu rangkaian system fungsional yang organic mekanistik.

Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pembelajaran penanaman nilai – nilai luhur untuk mencapai kesempurnaan hidup. Hal itu dilakukan secara kesinambungan demi mengembangkan kecerdasan manusia sebagai suatu potensi mutlak dalam rangka mencapai keseimbangan hidup secara

²⁷ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007) hlm.62

²⁸ *Ibid*, hlm.63

individual, bermasyarakat maupun yang bersifat ketuhanan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bentuk atau wujud – wujud pendidikan (pembelajaran hidup) seperti apa yang layak untuk diketahui, dipahami hingga akhirnya diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam arti luas, pendidikan dapat diidentifikasi karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Pendidikan berlangsung sepanjang jaman (life long education), artinya pendidikan berlangsung dari generasi ke generasi dan berlangsung tanpa henti.
- b. Pendidikan berlangsung di setiap bidang kehidupan manusia, artinya pendidikan berproses disamping pada bidang pendidikan sendiri juga di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, teknologi, perindustrian dan sebagainya. Di setiap bidang kehidupan pasti terkandung pendidikan, terlepas apakah persoalan itu sengaja diciptakan atau memang terjadi secara alami.
- c. Pendidikan berlangsung di segala tempat, segala waktu, artinya pendidikan berproses di setiap kegiatan kehidupan manusia.
- d. Obyek utama pendidikan adalah pembudayaan manusia dalam memanusiakan diri dan kehidupannya.²⁹

Dengan demikain, karena pendidikan berlangsung pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik disengaja ataupun alami, pendidikan selalu berlangsung apapun yang menjadi tujuan hidup manusia adalah tujuan

²⁹ *Ibid*, hlm. 84

sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan nilai – nilai moral dan ajaran keagamaan, alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status social, alat menguasai teknologi serta media untuk mengungkap rahasia alam raya dan manusia. Namun tak sedikit pula para praktisi dan pemikir pendidikan yang menempatkan pendidikan justru sebagai wahana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia serta wahana untuk pembebasan manusia.³¹

Sementara bagi kaum nasionalis, yang mendasarkan prinsip cinta tanah air berdasar pada rasa cinta sesama manusia seperti halnya Jamaluddin Al Afghani di Mesir dengan gerakan Pan Islamismenya. Misalnya juga Mahatma Ghandi, tokoh spiritual dan nasionalis India. Kemudian dalam konteks Indonesia sendiri terdapat RA. Kartini, Ki Hajar Dewantara dan Soekarno selain tokoh pendidikan nasionalis lain.

Jamaluddin Al Afghani yang terkenal dengan seruannya menentang imperialisme dan mengusahakan kebebasan, meningkatkan kesadaran intelektual yaitu membangkitkan kualitas pengetahuan (pendidikan) umat islam yang tertinggal, yang berakar pada sikap kembali kepada Islam. Sengan usahanya yang telah membangunkan dan menjunjung rakyat Islam di seluruh benua asia dari kegelapan dan kemunduran. Al Afghani menanam benih

³¹ DR. Mansoer Fakhri dalam , *Loc. Cit*, hlm.IV

Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip kedua pada sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab adalah adanya kesetaraan hak dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia sebagai manusia yang sama dimata Tuhan dan dunia. Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung esensi persatuan dan kesatuan seluruh bangsa yang plural terdiri dari beragam suku, agama, ras maupun bahasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan(dalam permusyawaratan perwakilan, sila ini mengandung makna demokrasi dalam tiap penyelenggaraan pemerintahan dengan musyawarah sebagai proses pelaksanaannya. Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini ingin menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tiap sila pancasila merupakan representasi dari prinsip-prinsip nasionalisme yang digaungkan Soekarno.

Jauh sebelum prinsip Nasionalisme lahir, telah terbit beberapa tokoh yang mengilhami, menginspirasi maupun penggerak perubahan kualitas pendidikan Indonesia, yang kesemuanya mendasarkan paa prinsip cinta tanah air, cinta sesama dan bangsa (nasionalisme).

a. RA. Kartini

Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 april 1879.³³

Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita, tokoh pendidikan yang berlatar cinta tanah air dan sesama. Pada zaman kartini belum lahir,

³³ Tashadi, *RA KARTINI*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1986) hlm.17

dipadukan dengan segi-segi pendidikan Indonesia pula. Diharapkan dari percampuran itu, niscaya akan tercipta sesuatu yang lebih baik. Cita-cita dan pemikiran Kartini tersebut ditulis dalam suratnya yang tertanggal 12 Juni 1902. Dalam hal peradaban, Kartini juga sangat menganjurkan pendidikan budi pekerti, hal ini dimaksudkan sebagai penyaring peradaban barat yang dianggap kurang sesuai dengan jiwa ketimuran Indonesia. Tidak hanya sebatas itu, pemikiran hebat Kartini juga menyoal pendidikan yang diadakan oleh kolonial Belanda yang dirasa masih banyak kekurangan hingga belum mampu mencerdaskan bangsa Indonesia. Para murid hanya diajari membaca, menulis, bahasa daerah dan berhitung. Kartini menginginkan adanya kesempurnaan pendidikan dengan pengadaan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa melayu dan bahasa Belanda. Karena menurutnya, bahasa-bahasa tersaebut akan memudahkan murid untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berbahasa asing supaya pengetahuan lebih luas. Sementara bagi Belanda, hal tersebut dikhawatirkan menjadi boomerang yang siap menghancurkan kolonialisme. Kartini menuntut supaya pemerintah Hindia Belanda segera mengubah politiknya dan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang berguna bagi rakyat. Untuk itu, Kartini juga berusaha mendirikan sekolah sendiri dan bertanggungjawab sebagai guru. Tujuan Kartini waktu itu hanya satu, yaitu memperbaiki keadaan pendidikan. Sekolah yang didirikan Kartini dikhususkan untuk perempuan dengan memebri nama

sekolahnya "Sekolah Gadis" . Perjuangan Kartini berakhir seiring dengan wafatnya pada 17 septemer 1904.

b. Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara lahir pada tahun 1928 di Yogyakarta. Dia dikenal luas sebagai seorang pendidik, budayawan maupun nasionalis pendidikan yang hebat. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pejuang untuk memberi jawaban atas pertanyaan " pendidikan apakah yang paling cocok untuk anak-anak Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah pendidikan nasional.

Usaha mewujudkan pendidikan nasional tersebut dimulai pada 3 juli 1922 dengan mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta. Pada waktu itu nama yang dipakai adalah National Onderwijs Instituut Taman Siswa (Lembaga Pendidikan Sekolah Taman Siswa).³⁵

Melalui perguruan taman siswa, Ki Hajar Dewantara mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Taman siswa melaksanakan kerja duta dan kerja membantu. Tugas yang pertama dimaksudkan untuk mendidik rakyat agar berjiwa kebangsaan dan berjiwa merdeka, untuk menjadi kader-kader yang mampu mengangkat derajat nusa dan bangsanya hingga bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang

³⁵ Darsiti Soeratman, *KI HAJAR DEWANTARA*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,1986) hlm.ix

merdeka. Tugas yang kedua, kerja membantu dimaksudkan untuk membantu perluasan pendidikan dan pengajaran yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sedang sekolah yang disediakan oleh pemerintah Belanda sangatlah terbatas.

Dalam penyelenggaraanya, Taman Siswa berjalan dengan kekuatan sendiri, tidak menerima subsidi dari pemerintah kolonial. Sebagai konsekuensinya, maka pejuang-pejuang Taman Siswa harus berani hidup sederhana penuh pengabdian. Selain itu. Di Taman Siswa tidak hanya menghendaki pembentukan intelek, tetapi juga dan terutama pendidikan dalam arti pemeliharaan dan latihan susila dengan menggunakan cara kekeluargaan. Dalam praksisnya, seorang guru atau pamong tidak hanya sekedar mengajar melainkan juga mendidik.

Dalam melaksanakan tugasnya, mengajar dan mendidik, pamong harus memberi tuntunan dan menyokong pada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan sendiri(bersifat kemandirian). Metode ini disebut metode *Among* dengan semboyan yang digunakan adalah *Tut Wuri Handayani* yang artinya mendorong anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Sementara fungsi pamong dalam hal ini hanyalah mengikuti di belakang bertugas mengamati dengan segala perhatian, pertolongan diberikan hanya jika

prasyarat materiil kemajuan adalah tenaga produktif yang bernama IPTEK (Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi).³⁷Tanpa itu, Indonesia selamanya akan menjadi kuli dan hanya bergantung pada IPTEK negara lain.

Sejak muda, soekarno dengan gagah beraninya melakukan gerakan – gerakan radikal yang menggemparkan dunia terjajah, Indonesia. Dalam upaya memerdekakan bangsanya yang tertindas, Soekarno senantiasa membuka mata, telinga, pikiran dan indra keenamnya(naluri) untuk dengan sigap melakukan manuver – manuver. Berasas pada cinta sesama sebagai suatu bangsa yang menghirup udara dan meneguk air yang sama di bumi Indonesia, Soekarno gemar melakukan propaganda baik malalui media tulis (surat kabar), pidato maupun tulisan – tulisan lain sebagai karya fenomenalnya yang kemudian dibukukan. Satu hal yang ingin ditegaskan oleh Soekarno pada tiap pemikiran dan pergerakannya adalah bahwa bangsa Indonesia harus bangun dari kemapanan dan keterbuaian kolonial yang dianggap mematikan. Menurut Soekarno, kondisi bangsa sudah sangatlah memprihatinkan. Kapitalisme dan imperialisme yang dikukuhkan penjajah semakin membuat anggota marhaen (kaum jelata) kian hari kian bertambah. Hal mendasar yang disoroti Soekarno sebagai faktor terjeratnya bangsa Indonesia kondisi tersebut adalah karena begitu tertinggalnya bangsa Indonesia dalam hal pendidikan, pengetahuan yang

³⁷ Nurani Soyomukti, *Metode Pendidikan Marxis Sosialis*, (Yogyakarta:Ar Ruzz Media,2008) hlm.265

bersumber pada mandegnya nilai- nilai mencari kebenaran baru. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia mudah dibodohi dan diadu domba. Semua itu tidak lepas dari adanya doktrin – doktrin agama yang semakin menyudutkan bangsa pada level kemunduran. Sehingga menurut Soekarno, sudah saatnya bangsa Indonesia bangun dan mengejar ketertinggalan, bahkan jika untuk itu harus berani mengadopsi ilmu dan pengetahuan dari barat yang notabene dalam pergaulan dan nasionalismenya sangat ditentang oleh Soekarno.

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam secara fundamental adalah berdasarkan Al-qur'an yang dengan keuniversalannya terbuka bagi setiap orang untuk mempelajari serta mengkritisinya. Segala bentuk usaha untuk mengkaji dan menampilkan gagasan-gagasan tentang konsep pendidikan Islam merupakan usaha positif. Hal ini karena agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w adalah mengandung implikasi pendidikan yang bertujuan menjadi *rahmatan lil-alamin*.

Setidaknya terdapat tiga istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu *al-Tarbiyat*, *al-Ta'lim* dan *al-Ta'dib*.³⁸ Menurut

³⁸ Prof.DR. H. Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.70

Ahmad Tafsir sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Jalaluddin kata *tarbiyat* mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang didalamnya sudah termasuk mengandung makna mengajar atau *allama*.³⁹

Dari segi linguistik menurut Al-Attas istilah *ilmu* diterapkan dalam Islam mencakup keseluruhan hidup yang bersifat universal untuk menuntun hidup manusia menuju keselamatan. Sebagaimana dalam tulisannya: From the point of view of linguistic usage, we must see that the fact that the term *ilm* has been applied in Islam to encompass the totality of life - the spiritual, intellectual, religious, cultural, individual and social – means that its character is universal, and that it is necessary to guide man to his salvation.⁴⁰ Sedangkan kata *ta'dib* oleh Naquib al-Attas diartikan sebagai pendidikan untuk manusia.⁴¹

Sedangkan menurut Muhammad Yunus dan Qosim Bakri dalam bukunya yang berjudul *Kitabut Tarbiyat Wata'limi* adalah: Pengertian pendidikan menurut istilah adalah: segala pengaruh yang dipilih yang bertujuan untuk membantu siswa dalam rangka meningkatkan jasmani dan rohani serta akhlak (tingkah laku) sehingga sampai pada tujuan yang sempurna.⁴²

Sementara menurut beberapa pakar, pendidikan Islam sendiri diartikan

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Syed Muhammad Al Naquib Al Attas, *Aims And Objectives Of Islamic Education*, (Jeddah: King Abdulaziz University, 1979), hlm.37

⁴¹ Prof. Dr. H., Jalaluddin, *Op. cit*, hlm.71

⁴² Muhammad Yunus dan Qosim Bakri, *Kitabut Tarbiyah Wa Talimi*

di antaranya:

a. Achmadi

“Pendidikan Islam adalah sebagai usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam”.⁴³

b. Abdurrahman an-Nahlawi

“Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syari’at Allah SWT”.⁴⁴

c. Menurut Drs. Ahmad D. Marimba

“Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.⁴⁵ Dari beberapa pengertian pendidikan Islam di atas dapat kita pahami bahwa proses kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia, berupa kemampuan belajar. Sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan sekitar di mana ia hidup. Proses tersebut

⁴³ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992) hlm.20

⁴⁴ Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Sumah, Sekolah Dan Masyarakat*,(terj) shihabuddin: Gema Insani Press, 1995) hlm.26

⁴⁵ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al maarif,1974)hlm.23

berpedoman pada isi al-Qur'an dan as-Sunnah serta harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur oleh para mujahid.

Oleh karena itu para ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang zaman, semenjak wafatnya Rasulullah Saw. Dimana yang menjadi sasaran ijtihad adalah segala sesuatu yang di butuhkan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang, sebagaimana ijtihad dalam bidang pendidikan, hal ini sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan terasa semakin mendesak serta sangat urgen sekali, bukan saja pada bidang materi, isi, namun juga dalam bidang sistem dalam pengertian yang luas. Ijtihad dalam bidang pendidikan harus bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diproses oleh para pakar pendidikan Islam dan Ijtihad tersebut harus berkaitan dengan kebutuhan hidup pada suatu tempat dalam situasi dan kondisi tertentu. Dalam teori –teori hasil ijtihad itu harus dikaitkan dengan ajaran Islam.

Kenyataan sekarang ini, menunjukkan bahwa ijtihad dalam bidang pendidikan semakin sangat diperlukan sebab dengan berputarnya roda kehidupan menunjukkan semakin majunya lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Sementara sistem pendidikan di satu pihak menuntut harus senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi yang berkembang cepat. Namun dipihak lain dituntut agar tetap konsisten dan sesuai dengan ajaran Islam. Problem semacam itulah yang

menuntut mujtahid muslim dalam bidang pendidikan agar peka dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, serta tidak berseberangan dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kesiapan untuk berbuat baik maupun kejahatan dan mengutus para Rasul-Nya kepada umat manusia agar membimbing mereka untuk beribadat kepada-Nya dan mentauhidkan-Nya. Islam memandang tujuan manusia di alam ini adalah beribadah, serta menjadi khalifah di bumi untuk memakmurkannya dengan melaksanakan syari'at dan mentaati perintah Allah. Allah SWT telah menjelaskan tujuan ini di dalam firman-Nya: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.* (QS. Adz-Dzariat: 56)⁴⁶

Manusia yang beriman dan bertaqwa merupakan modal utama pembangunan suatu bangsa. Inilah yang merupakan cita-cita pendidikan kita sejak dulu. Dalam hasil seminar pendidikan se Indonesia tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor, adalah menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi luhur menurut ajaran Islam.⁴⁷

Sedangkan dalam Konferensi Pendidikan pertama di Mekkah (1977)

⁴⁶ Depag. RI., *Op. Cit.*, hlm. 862

⁴⁷ H.M. Arifin M.Ed., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 29.

para ahli sepakat bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah untuk membina insan yang beriman dan bertaqwa yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, membina serta memelihara alam sesuai dengan syari'ah serta memanfaatkannya sesuai dengan aqidah akhlak Islam.⁴⁸

Secara filosofis tujuan pendidikan dibedakan dalam beberapa bidang menurut tugas dan fungsi manusia, yaitu:

Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar dalam rangka mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia akhirat.

- a. Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan dunia masyarakat sebagai keseluruhan dan dengan tingkah laku masyarakat umum agar dapat serta merubah pribadi, pengalaman dan kemajuan hidupnya.
- b. Tujuan profesional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu seni dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat.⁴⁹

Dalam proses kependidikan, ketiga tujuan di atas dicapai secara integral tidak terpisah dari satu sama lain, dapat mewujudkan tipe manusia paripurna seperti yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam, maka peran keluarga sangat relevan sebagai sarana tercapainya tujuan pendidikan Islam. Adapun tujuan akhir Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa inti bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir batin di dunia dan akhirat. Dengan kata

⁴⁸ Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H., *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 4, hlm. 181-182.

⁴⁹ *Loc. Cit*

lain pendidikan adalah untuk mewujudkan akhlak yang mulia dan merealisasikan ubudiyah kepada Allah di dalam kehidupan manusia baik individual maupun sosial.

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan di bawah penumbuhan dorongan agama dan akhlak adalah: Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah-akidah Islam, dasar-dasarnya, Ushul-ushul Ibadah, dan cara-cara melaksanakannya dengan betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah agama dan menjalankan serta menghormati syi'ar-syi'ar agama.

- a. Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap agama termasuk prinsip-prinsip, dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Begitu juga menyadarkannya akan segala bid'ah, khurafat, kepalsuan-kepalsuan dan kebiasaan yang melekat kepada Islam itu tanpa disadari, padahal Islam bersih.
- b. Menanamkan keimanan kepada Allah SWT pencipta alam, dan kepada malaikat, Rasul-Rasul, kitab-kitab dan hari akhir berdasar pada paham kesadaran dan kehalusan perasaan.
- c. Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan adab dan pengetahuan keagamaan serta untuk mengikuti hukum-hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan.
- d. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Alqur'an, membacanya dengan baik, memahaminya dan mengamalkan ajaranajarannya.

- e. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam serta pahlawan-pahlawannya dan mengikuti jejak-jejak mereka.
- f. Menumbuhkan rasa rela, optimisme, kepercayaan diri, tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa, kasih sayang, cinta kebaikan, memegang teguh pada prinsip, berkorban untuk agama dan tanah air dan siap membelanya.
- g. Mendidik naluri, motivasi dan keinginan generasi muda, membentinginya dengan akidah-akidah dan nilai-nilai, membiasakan mereka menahan motivasi-motivasinya, mengatur emosi dan membimbingnya dengan baik.
- h. Menanamkan iman yang kuat kepada Allah SWT pada diri mereka, dan menguatkan perasaan beragama, dorongan agama dan akhlak pada diri mereka, serta menyuburkan hati mereka dengan kecintaan, dzikir, taqwa, dan takut kepada Allah SWT.
- i. Membersihkan hati mereka dari dengki, hasud, iri hati, benci, kekerasan, kezaliman, egoisme, tipuan, khianat, nifak, ragu, perpecahan, dan perselisihan.⁵⁰

Sedangkan menurut para ahli pendidikan, diantara tujuan pendidikan adalah :

⁵⁰ Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bintang Terang, 1979), cet. I, hlm. 423-424.

- a. Shaleh Abdul Azis dan Dr. Abdul Azis Abdul Majid mengungkapkan bahwa Pendidikanlah yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menentukan arah kehidupan.⁵¹
- b. Menurut Prof. Mohd. Athiya El-Abrasyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam menyimpulkan lima tujuan yang asasi yaitu :
 - 1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia
 - 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
 - 3) Persiapan untuk mencari rezki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan.
 - 4) Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada belajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu.
 - 5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional; teknis dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, supaya ia dapat mencari rizki dalam hidup dan hidup dengan mulia disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.⁵²

Dari beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indra.

⁵¹ Shaleh Abdul Azis dan Dr. Abdul Azis Abdul Majid, *Attarbiyah Watthuruqut Tadrissi*, (Mesir: Darul Ma'arif, 1928), Jilid I, hlm. 14.

⁵² Mohd. Athiya Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, , terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm, 1-4. 32

Sehingga akan mampu mendorong semua aspek tersebut kearah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup. Yang pada akhirnya akan membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

4. Aspek-Aspek yang Terkandung dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai penuntun prilaku umat manusia mempunyai banyak aspek maupun ruang lingkup kajian yang luas. Segala persoalan kehidupan manusia, tidak satupun yang lepas dari pembahasan pendidikan Islam. Mulai dari persoalan tata cara beribadah sampai pada persoalan tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam banyak mengupas tentang persoalan politik, ekonomi, budaya maupun mu'amalah yang lain termasuk tentang mengajarkan berdemokrasi, berjuang, menanamkan rasa percaya diri, cinta kasih dan menghargai orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama ajaran Islam banyak menyinggung berbagai macam persoalan baik yang berupa akidah (keimanan), syari'ah, ibadah, muamalah, akhlak maupun tarikh (sejarah) Islam. Akidah atau keimanan merupakan akar atau pokok agama. Ibadah, muamalah, dan akhlak bertitik tolak dari akidah, dalam arti sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari'ah merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Dalam hubungannya dengan Allah diatur dalam ibadah dalam arti khusus (thaharah, salat, zakat, puasa, dan haji) dan dalam hubungannya dengan sesama manusia

dan lainnya diatur dalam muamalah dalam arti luas. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan, iptek, kesehatan dan lainlain) yang dilandasi akidah yang kokoh. Sedangkan tarikh (sejarahkebudayaan) Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyari'ah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan system kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.⁵³

Muhaimin juga memaparkan tentang konsep dasar atau prinsip umum tentang materi (kurikulum) pendidikan Islam, yaitu:⁵⁴

- a. Aspek atau prinsip yang bertautan dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Hal ini mengajarkan bahwa manusia membutuhkan kepada bimbingan dan petunjuk yang benar yang bernilai mutlak untuk kebahagiaan dunia dan akhirat yang berasal dari Allah yaitu berupa agama.
- b. Prinsip totalitas dan integritas dalam mempelajari ajaran Islam. Karena Islam memiliki nilai universal dalam segala hal. Islam adalah *rahmamatal lil alamin*; termasuk menekankan pada pendidikan kasih sayang, menghormati dan menghargai hasil karya orang lain, kebebasan berfikir,

⁵³ Muhaimin, Et. Al, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 80.

⁵⁴ Muhaimin, , *Konsep Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hlm. 33-35

humanisme dan prulalisme serta tidak mengenal etnisitas maupun sekterianisme.

- c. Berangkat dari konsep Islam tentang manusia, antara lain bahwa manusia tersusun dari tiga unsur, yaitu unsur tubuh, akal dan kalbu. Ketiga unsure itu harus selalu diperhatikan dan dikembangkan sehingga terjadi keselarasan. Pendidikan Islam hendaknya mengantar peserta didik menjadi orang yang cerdas, pandai berfikir dan dapat menggunakan akalnya dengan baik; Pendidikan Islam hendaknya diarahkan agar peserta didik menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah, selalu ingat kepada-Nya, mau mensyukuri nikmat-Nya dan tidak kufur. Pendidikan Islam mengantar peserta didik agar memiliki ketrampilan untuk mempertahankan diri dan ketrampilan untuk bekerja, berjiwa makarnya, suka bekerja keras serta memiliki jiwa yang mantap dan nafsu yang bersih.
- d. Manusia adalah makhluk yang terbatas kemampuannya, dan ia bekerja atau beramal menurut tabiat, bakat dan kemampuan serta pengaruh alam sekitarnya. Maka membangun/ membentuk lingkungan dalam arti secara luas (masyarakat dan bangsa) yang syarat akan nilai kasih sayang merupakan usaha yang positif dalam mengembangkan moralitas bangsa.
- e. Islam mendorong manusia untuk dinamis dan kreatif. Islam mendorong dan menggalakkan pada pemeluknya agar selalu mengadakan yang belum ada, merintis jalan yang belum ditempuh, serta membuat inisiatif dalam

- c. Menyadarkan, manusia sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai *Homo divinans* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiusitasnya perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya. Dengan kesadaran yang demikian, manusia sebagai khalifah di atas bumi dan yang terbaik di antara makhluk lain akan mendorong untuk melakukan pengelolaan serta mendayagunakan ciptaan Allah untuk kesejahteraan hidup.
- d. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.

Dari pemaparan tentang kandungan sekaligus sasaran pendidikan Islam tersebut dapat kita tangkap bahwa ada beberapa prinsip pendidikan Islam yang mengajarkan tentang Prinsip totalitas dan integritas dalam mempelajari ajaran Islam. Bahwa Islam adalah *rahmamatal lil alamin*; termasuk menekankan pada pendidikan kasih sayang, menghormati dan menghargai hasil karya orang lain, kebebasan berfikir, humanisme dan prulalisme serta tidak mengenal etnisitas maupun sekterianisme. Islam mengajarkan tentang persamaan, persaudaraan, gotong royong, dan musyawarah sebagai upaya membentuk masyarakat menjadi suatu persekutuan hidup yang utuh. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan tentang keberadaan paradigma nasionalisme menjadi salah satu prinsip

sekaligus sasaran pendidikan Islam.

Metode pendidikan dan pengajaran dalam rangka pendidikan Islam sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah meyerukan adanya persamaan prinsip dan kesempatan yang sama dalam belajar sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang.⁵⁷

Athiyah Al-Abrasyi juga menyatakan bahwa di dalam pendidikan Islam terwujud prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, persamaan dan kesempatan yang sama buat belajar, tanpa diskriminasi antara si kaya dan si miskin.⁵⁸ Betapa dunia pendidikan Islam menghargai segala bentuk hak asasi manusia dalam perikehidupan.

6. Unsur-Unsur Nasionalisme Dalam Pendidikan Islam

a. Keseimbangan Logika Dan Rasa

Islam satu-satunya agama di muka bumi yang akan memberikan porsi akal dengan tepat, satu-satunya agama yang menghormati akal. Luar biasa, seluruh agama selain Islam dalam akidah mereka benar-benar telah mematikan akal sehat manusia. Hanya akidah Islam yang membuka keyakinan dengan akal.⁵⁹

Katakanlah “apakah sama antara orang yang berilmu dan orang

⁵⁷ Mohd. Athiyah Al-Abrasyi, *Op. Cit*, hlm. 5

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 10

⁵⁹ Prof DR. Muhammad Hasan al Hamsyi, Tafsir Wa Bayan Mufrod Alquran Mushaf Tajwid Ma Asbabun Nuzul Lis Syahyuti 1999 dikutip Arifin Jayadiningrat, LSq, Membangun Kepribadian Muslim, <http://joomla/2/07/2008>

karakter toleransi.⁶¹

d. Terbuka, Akomodatif Dan Selektif

Dari satu segi, Islam bersifat terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, namun bersamaan dengan itu Islam juga selektif yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan memfilter dan menyesuainya dengan ketentuan ajaran Islam. Dalam hal ilmu dan teknologi, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka atau tidak tertutup. Bagaimanapun juga Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Ia merupakan mata rantai peradaban dunia, baik dunia Barat maupun Timur.⁶²

" Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat , anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibn sabil, orang-orang yang meminta-minta, hamba sahaya,; mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan janjinya apabila berjanji, bersabar dalam keadaan keadaan peperangan, kesusahan dan kesempitan. Itulah orang-orang yang benar (imannya) dan itulah orang-orang yang bertaqwa kepad Allah". (QS. Al Baqarah, 177)

⁶¹ DR. H. Abuddin Nata, MA, *Metodologi Studi Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.80

⁶² *Ibid*, hlm.85

e. Pembebasan

Pendidikan secara kodrati adalah sebagai instrumen yang membawa pribadi kepada penentuan diri menuju pada kemandirian, pengenalan jati diri dan kebebasan dari *keterbelungguan* marginalitas. Pendidikan Islam sebagai pranata sosial, juga sangat terikat dengan pandangan Islam tentang hakekat keberadaan (*eksistensi*) manusia. Oleh karena itu pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah.

Pembedanya adalah kadar ketaqwaan, sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif. Pendidikan Islam pada akhirnya bermuara pada pembentukan manusia sesuai dengan *kodratnya* yang menyangkut dimensi *imanensi* (horizontal) dan dimensi *transendensi* (vertical; hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Pencipta).⁶³

Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin.⁶⁴ Al- Qur'an juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat yang lemah dan tertindas.

Dalam firman Allah: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan

⁶³ Muslih Usa, ed., *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 31

⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. 1, hlm. 33

Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mempunyai nilai pembebasan terhadap belenggu-belenggu kebodohan yang berdampak pada matinya kreatifitas maupun belenggu marginalitas. Namun kebebasan tentu ada batasnya. Kebebasan tanpa batas akan berbenturan dengan hak-hak orang lain dan pada akhirnya menimbulkan *anarki* disetiap lini kehidupan. Karena tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah agar anak didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah. Itu berarti kebebasan disini dibatasi oleh hukum-hukum dan ajaranajaran yang ditentukan oleh Allah agar dijadikan pegangan untuk menjadi manusia yang bertaqwa.

f. Patriotisme

Nasionalisme dan patriotisme lahir dari semangat solidaritas yang dianjurkan oleh agama Islam.⁶⁶ Solidaritas ummah inilah yang menimbulkan semangat anti penjajah. Pergerakan dan perjuangan melawan kekuasaan penjajah yang muncul di Indonesia membuktikan

⁶⁵ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 131

⁶⁶ Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 138

bahwa Islam mampu menjadi faktor pemersatu dan penggerak bangsa menuju kepada ambang kemerdekaan. Islam sendiri mengajarkan tentang pentingnya patriotisme, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an:

Dan berjuanglah kamu dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu termasuk orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S: At-Taubah: 41).⁶⁷

g. Humanisme

Dalam pendidikan Islam, humanisme merupakan prinsip yang tidak pernah lepas dari materi maupun proses belajar mengajar yang diterapkannya. Karena Islam memiliki nilai universal dalam segala hal. Islam adalah *rahmamatal lil alamin*; termasuk menekankan pada pendidikan kasih sayang, menghormati dan menghargai hasil karya orang lain, kebebasan berfikir, humanisme dan pluralisme serta tidak mengenal etnisitas maupun sektarianisme.

Pendidikan pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan sosial, proses adopsi dan inovasi dalam pembangunan, pendidikan harus mendahului perubahan sosial. Posisi pendidikan Islam pada saat ini dan yang akan datang dalam kaitannya dengan perubahan sosial cultural adalah untuk memberikan makna pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih adil dan beradab.⁶⁸

⁶⁷ Depag. RI, *Op. Cit*, hlm. 285

⁶⁸ Drs. HM. Chabib Thoah, MA., *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. 1, hlm. 26-27

h. Pluralisme

Kurikulum pendidikan Islam mengakui adanya perbedaan-perbedaan individual diantara para peserta didik , baik dalam bakat, minat, kemampuan-kemampuan, kebutuhan-kebutuhan maupun masalah-masalah yang dihadapinya.⁶⁹ Secara tersirat Islam mengajarkan bahwa pluralisme bukanlah sebagai instrumen pembatas yang mengkotak-kotak ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan konsep Al-Qur'an yang menyatakan:

Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT. ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui dan Maha mengenal. (Al-Hujurat: 13)⁷⁰

i. Persatuan

Landasan hukum agama adalah bahwa segala dimensi kehidupan baik pribadi maupun kehidupan komunitas di bawah otoriterisme Tuhan. Ia secara penuh mendapatkan legitimasinya pada kekuasaan tertinggi dan kehendak Allah SWT. Komunitas tadi dipandang sebagai suatu ikatan dalam kesatuan konsep *ummatan wahidah* Ini berarti bahwa loyalitas pokok individu ialah pada *ummah* bukan pada negara. Sebagaimana

⁶⁹ Drs. Muhaimin , M.A., *Konsep Pendidikan Islam Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hlm. 34

⁷⁰ Depag. RI, *Op. Cit*, hlm. 847

firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 103:

Berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah... (QS. Ali Imran: 103)

j. Demokratisasi

Islam mempunyai sifat yang istimewa, yang meletakkan dasar keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme.⁷¹ Islam mengakui hak pribadi setiap orang dalam hal melakukan aktifitas sehari-hari. Tidak ada larangan seorang mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang atau kelompok lain. Pendapat yang berbeda dalam menanggapi atau merespon sebuah permasalahan adalah kewajaran, dan untuk menyamakan persepsi tersebut Islam mengajarkan tentang musyawarah dalam berdemokrasi. Sebagaimana firman Allah SWT:

*"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S: Asy Syura: 38).*⁷²

Metode pendidikan dan pengajaran Islam, sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.⁷³ Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar.

⁷¹ Dr. Khursyid Ahmad, MA. LLB, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 35

⁷² Depag. RI, *Op. Cit*, hlm. 789.

⁷³ Prof. Dr. Mohd. Athiyah Al-Abrasy, *Op. Cit*, hlm. 5

BAB III

KONSEP NASIONALISME PENDIDIKAN SOEKARNO

A. Riwayat Hidup Soekarno

1. Kelahiran dan Masa Kanak-kanak

Soekarno dilahirkan pada saat fajar mulai menyingsing atau juga bisa dikatakan fajar kebangkitan bangsa Indonesia mulai terbit, yaitu dimasa kebangkitan dan pergerakan nasional. Tepatnya pada hari Kamis Pon tanggal 18 Sapar 1831 tahun Saka bertepatan dengan tanggal 6 Juni tahun 1901 di Lawang Seketeng Surabaya. Soekarno adalah anak kedua dari pasangan suami istri Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Idayu Nyoman Ray, sedang kakaknya bernama Soekarmini.¹ Raden Soekemi sendiri tergolong orang yang berpendidikan, sesudah ia tamat dari sekolah rendah kemudian meneruskan pelajaran ke sekolah guru – Kweekschool – di Probolinggo (Jawa Timur), dan ia termasuk pelajar yang terpandai.²

Pada saat pemerintah Belanda mendirikan sekolah rakyat yang pertama kali di Bali, Raden Soekemi mencoba merealisasikan perbendaharaan ilmunya di sekolah rendah tersebut. Berkat kegigihan dan kepandaiannya, pemerintah Belanda lewat Prof. Van De Tuuk memberikan kehormatan kepada guru muda Soekemi untuk menjadi pembantunya dalam mengadakan

¹ Solichin salam, bung karno putra sang fajar,(Jakarta: gunung agung,1966),hlm.17-18

² Ibid, hlm.15

tetap disandanginya sampai dalam perjuangan menghadapi pemerintah kolonial. Ia tetap menjadi “jago” di atas podium maupun dalam hal-hal operasional.

2. Pendidikan Soekarno

Secara formal Soekarno pertama kali menjalani pendidikannya di Sekolah Desa di Tulungagung. Di sekolah, Soekarno bukanlah tergolong anak yang pandai dan rajin belajar meskipun bukan berarti dia anak yang bodoh. Hal ini disebabkan oleh belum munculnya kesadaran yang penuh akan pentingnya arti pendidikan. Soekarno lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengenang kisah-kisah dalam pewayangan daripada untuk belajar dan membaca. Meskipun demikian ia selalu bertanya tentang apa yang tidak dimengerti baik kepada gurunya atau kepada ayahnya sendiri. Kebiasaan inilah yang mengangkat posisi Soekarno lebih pandai (kritis) dari teman-temannya, dan menyebabkan ia dipindah sekolah dari Tulugagung ke Sekolah angka dua (Angka Loro) di Sidoarjo. Ketika umurnya masih 12 tahun ia duduk di kelas enam. Karena kesadarannya yang mulai tumbuh yang tentunya tidak lepas dari pengaruh bimbingan bapaknya, Soekarno mulai belajar dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pandai. Ini pulalah yang menyebabkan ia dipindahkan dan dimasukkan ke Sekolah “Eurepeese Lagere School” (ELS) di Mojokerto. Di sana Soekarno di terima di kelas lima, meskipun demikian aktifitas belajarnya semakin giat dan terus ditingkatkan.

Sebagai pemimpin besar Sarekat Islam, Cokroaminoto tidak pernah kering dari berbagai kegiatan politik. Hal inilah yang betul-betul dimanfaatkan oleh Soekarno untuk menyelami secara lebih dalam arus politik di Indonesia. Kenalannya dengan para tokoh Sarekat Islam, disadarinya sebagai mediator untuk mengetahui berbagai bentuk pemikiran kontemporer, baik dalam dimensi ekonomi, politik, kultur maupun religius. Pertanyaan-pertanyaan seputar perkembangan politik di Indonesia tidak henti-hentinya dilontarkan oleh Soekarno pada para tokoh tersebut. Bahkan tidak jarang Soekarno menyempatkan diri untuk tidak bersama mereka manakala mereka menginap di rumah Cokroaminoto supaya bisa mengajukan pertanyaan lebih banyak, dan lebih tepatnya supaya bisa melakukan diskusi mengenai berbagai dimensi pemikiran khususnya dalam bidang politik dan religius dengan mereka. Hal ini dilakukan Soekarno untuk memperluas lahan pengetahuannya disamping sebagai barometer intelektual yang sudah diperolehnya selama ini. Apalagi setelah ia resmi menjadi menantu Cokroaminoto dengan mengawini putrinya Utari, sehingga dia selalu menemani Cokroaminoto ke pertemuan-pertemuan untuk berpidato.

Dari sini Soekarno mulai memperdalam pengetahuan retorika dari tokoh tersebut. Setiap kesempatan ia juga gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membaca baik di rumah maupun di perpustakaan besar yang diselenggarakan oleh perkumpulan theosofi. Soekarno dapat memanfaatkan perpustakaan itu dengan tanpa batasnya, terutama karena ayahnya merupakan

salah satu anggota perkumpulan tersebut. Lewat bacaan-bacaan itu ia dapat bertemu dengan orang-orang besar, dan bahkan telah mendominasi pikiran-pikirannya.

Begitulah misalnya dengan membaca buku, ia dapat berbicara dengan Thomas Jefferson yang bercerita tentang *Declaration of Independence*, yang ditulisnya pada tahun 1776.⁶ disamping mengenal Karl Marx dengan Marxisnya.

Selain mendapatkan pengalaman politik dari para tokoh di atas, Soekarno juga banyak mendapatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu ke-Islaman. Dan pengetahuannya tersebut dikembangkan sejak ia diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Ende (Flores) dalam tahun 1934. Hal ini terbukti dari surat-suratnya yang diterbitkan dalam bentuk risalah, yang berjudul “Surat Islam dari Ende” yang di dalamnya mencerminkan tentang perhatian Bung Karno terhadap Islam.⁷

Setamat dari HBS Surabaya pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan ke Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hogeschool/ THS*) di Bandung. Diantara anak-anak Bumi Putra yang mendaftar di THS hanya sebelas anak yang diterima, termasuk di dalamnya Soekarno. Sebagai mahasiswa, aktifitas belajar dan kegiatan kampus tetap menjadi rutinitasnya. Namun demikian pengaruh dari pergerakan politik yang memang telah tertanam dalam jiwanya

⁶ Badri Yatim, Soekarno, Islam Dan Nasionalisme, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm.11

⁷ Solichin salam, *op. cit*, hlm.172-173

ketika ia ditawarkan jadi asisten guru di sekolah tersebut. Prinsip asas nasionalisme yang sudah berakar pada dirinya direfleksikan baik dalam bentuk tulisan maupun secara operasional dan ini mulai terjadi di tahun-tahun 1926-1927 dimana banyak gerakan sedang mengalami masa transisi dan mengharuskan munculnya unsur kiri yang akhirnya mengalami stagnasi. Sebagai misal, Sarekat Islam berada dalam pengaruh kuat sosialis radikal yang terinspirasi dari revolusi Rusia yang juga diorganisir dalam sebuah kelompok dimana sebelumnya pada tahun 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia.⁹ Benih nasionalisme yang terbit pada tahun 1926 itu, ditandai dengan lahirnya persatuan dalam bentuk tulisan yang berjudul Nasional, Islamisme, dan Marxisme. Menurutnya inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia, dan tentu pula rohnya pergerakan-pergerakan di Indonesia.¹⁰ Selama di Bandung ini pulalah peristiwa-peristiwa penting lainnya telah memberi kesan tersendiri bagi Soekarno. Diantaranya, pertemuannya dengan Inggit yang selama di THS telah mendorongnya untuk tekun belajar, baik secara formal maupun non formal.¹¹ Studi Club yang dibentuknya telah menerbitkan majalah “Suluh Indonesia Muda”, yang juga ikut mengantarkannya lulus dari sekolah tersebut

⁹ W.F.Werteim, Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, (Yogyakarta: PT/ Tiara Wacana, 1999), hlm.52

¹⁰ Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1, (Jakarta: Panirtya penerbit dibawah bendera revolusi,1965) hlm.2

¹¹ Solichin Salam, *op. cit*, hlm.33

ekspansi kolonial Belanda. Imperialisme tersebut telah menjerat dan menyumbat krangkran kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sistem herarkis yang tercipta akibat kebijakan dan politik Etis Belanda menyebabkan munculnya tiga golongan kelas. Pertama, golongan Belanda sebagai kelas Penguasa. Kedua, golongan bangsa Timur Asia. Dan ketiga adalah golongan bumi putera sebagai golongan tertindas. Penjajah yang cenderung destruktif menambah keadaan semakin tidak kondusif. Hal ini kemudian membuka kesadaran warga Indonesia untuk melakukan pemberontakan dan pemboikotan terhadap kekuatan dominan tersebut walaupun bentuk perlawanan masih bersifat tradisional. Perlawanan tersebut seperti halnya Perang Diponegoro, Perang Padri maupun Perang Aceh.¹³ Gerakan-gerakan rakyat tersebut disamping masih bersifat kedaerahan, strategi dan taktiknya masih terlalu sederhana apabila dibandingkan dengan gerakan sosial modern seperti yang dilancarkan oleh komunis, sosialisme, fasisme dan sebagainya.¹⁴ Meskipun perlawanan-perlawanan tersebut masih dalam tataran primordial, namun setidaknya usaha mempertahankan hak dan kebebasan telah ada. Politik etis yang secara resmi dimulai setelah tahun 1901.¹⁵ semakin melengkapi bentuk agresi drastis Penjajah Belanda. Sementara itu gerakan radikalisme yang menempatkan arus nasionalisme politik sebagai porosnya mulai nampak. Gerakan militan ini diantaranya

¹³ Sartono Kartodirjo, Et. Al, Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1975), hlm. 241

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: (PT. Cipta Adi Pustaka, 1990) hlm. 316

adalah Serikat Islam (SI) yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto dari tahun 1912 hingga 1924.¹⁶ Kemudian disusul dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang bertujuan mengajak umat Islam untuk kembali kepada Alqur'an dan Hadits. Sebelumnya pada 25 Agustus 1912 berdirilah "Indische Partij" yang dipelopori oleh Tri Tunggal: Dr. E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat di Bandung.¹⁷ Dalam waktu yang hampir bersamaan, di negeri Belanda organisasi pelajar (*Indische Veregening*) memasuki fase kedua, fase politik terutama sebagai pengaruh dari tiga tokoh *Indische Partij* yang dibuang ke negeri Belanda. Dalam tahun 1914 oleh Hendrik Sneevliet didirikanlah *Indische Social Democratische Vereniging* yang berhaluan kiri dan radikal. Partai ini sejak tanggal 23 Mei 1920 bertukar nama menjadi *Comunistsiche Partij In Indie* yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1922 oleh para Mahasiswa di Negeri Belanda, seperti Iwa Kusuma Sumatri, Muhammad Hatta, Gunawan Mangunkusumo, didirikanlah Perhimpunan Indonesia yang bertujuan persatuan, demokrasi, kemerdekaan Indonesia. dengan jalan "self-help".¹⁸ Kemudian untuk selanjutnya disusul oleh partai-partai Nasionalisme politik yang tumbuh sesudahnya, salah satunya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno bersama-sama dengan Mr. Isqaq Tjokrohadisurjo, Dr.

¹⁶ Amelz, (ed) H.O.S. Hidup Dan Perjuangannya, (Jakarta: Bulan Bintang,1990), hlm. 143

¹⁷ Solichin salam, *op. cit*, hlm.50

¹⁸ *Ibid*, hlm.51

c. Membentuk susunan pengajaran kebangsaan.²⁰

Dengan didasarkan pada misi dan visi perjuangan yang demokratis dan kerakyatan maka loyalitas bukan sebagai personal arogansi, tetapi lebih dari itu merupakan kreditasi yang menempatkannya sebagai “bapak kaum Marhen”. Hingga pada tahun 1931 Soekarno bersama teman-temannya disidang. Dalam sidangnya Soekarno menggemparkan dunia lewat pledoinya yang heroik serta gagah berani, yang secara nyata telah menelanjangi kejahatan dan kebusukan imperialisme otoritas. Karena bagi Soekarno imperialisme adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain.²¹

Secara teoritis pledoinya ini kemudian dibukukan dengan judul “Indonesia Menggugat”. Dari penjara satu ke penjara lain itulah konsekuensi dari sebuah perjuangan. Walaupun akhirnya Soekarno keluar dari penjara Suka Miskin, akan tetapi berdasarkan keputusan Pemerintah Kolonial, ia kemudian dibuang ke Flores pada tanggal 17 Februari 1934. Selama dalam pembuangan di Ende (Flores), Soekarno memperdalam pengetahuan Islam dan Ke-Islaman. Hal ini dapat diketahui dari Surat-surat yang dikirimkannya kepada A. Hasan di Bandung (kemudian pindah ke Bangil). Kemudian dengan besluit pemerintah Kolonial tertanggal 14 Februari 1938, Soekarno

²⁰ *Ibid* hlm. 53-54

²¹ Soekarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta: Gunung Agung. 1983) hlm.16

dipindahkan ke Bengkulu, dan resmi menjadi anggota perserikatan Muhammadiyah sejak tahun tersebut ia menjabat sebagai Ketua Bagian Pengajaran Muhammadiyah daerah Bengkulu. Sampai kemudian pada tahun 1942 ia dibebaskan oleh tentara Jepang. Pembebasan Soekarno oleh Jepang ini bukan berarti memberikan ruang gerak bagi para pioner nasionalis lainnya, akan tetapi lebih merupakan taktik Jepang untuk mengukuhkan kebijakan imperial serta melestarikan bentuk lama fisisme ataupun hal-hal yang memecah belah rakyat Indonesia. Meskipun demikian gerakan-gerakan teritorial anti-imperial seperti PETA (Pembela Tanah Air) muncul dalam wujud pembelaan yuridis rakyat terhadap ekspansi “pecah belah” tersebut.

Menjelang tekuk lututnya tentara Jepang, Soekarno duduk dalam “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan” (Dokuritsu Ziyumi Tyoosakai). Dalam badan ini ia ikut memprakarsai Dasar Negara Indonesia, yang kemudian telah menetapkan bentuk baru kelembagaan Yuridis dengan apa yang disebut dengan “Pancasila”. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 di gedung Pejambon (sekarang Kementerian Luar negeri RI) Jakarta, yang kemudian diterima sebagai dasar falsafah negara. Ide ini selanjutnya termanifestasikan dalam “Piagam Jakarta” yang ditanda tangani oleh bung Karno serta tokoh-tokoh nasional lainnya pada tanggal 22 Juni 1945.²² Hingga pada pertengahan Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Dalam kondisi Vacuum of Power yang demikian, maka pada tanggal 17 Agustus 1945

²² Solichin Salam, *Op. Cit*, hlm.84

bertepatan dengan hari Jum'at Legi tanggal 10 Ramadhan 1364 Hijriah jam 10.00 di Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta Soekarno memproklaimkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah rapat Komite Nasional, di mana selain menetapkan UUD'45 juga mengangkat Soekarno sebagai Presiden RI pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden. Selang beberapa hari datanglah tentara Sekutu yang diboncengi oleh tentara NICA dan pertempuranpun kembali berkobar. Sehingga pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang sebelumnya bernama Badan Keamanan/ Kesejahteraan Rakyat (BKR) yang kemudian dalam perkembangannya dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai sekarang.²³

Kondisi negara yang labil dan masih diwarnai agresi drastis otoriterisme baik intern maupun ekstern menggaris bawahi untuk dikeluarkannya Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD'45 setelah konstituante tidak berhasil menyusun Undang-undang Dasar serta membubarkan hasil pemilihan Umum. Kemudian pada tahun 1960 dibentuk juga DPR-GR (Gotong Royong) sebagai relevansi dari DPR hasil pemilu 1955, yang dirasakan kurang mampu menelurkan idealisme konkrit. Kabinet Gotong Royong adalah bentuk kabinet yang parlementerinya terdiri atas semua wakil partai politik yang ada.²⁴

²³ *Ibid*, hlm.101-106

²⁴ Ensiklopedi Nasional Indonesia, *op. cit*, hlm.212

Sejak tahun ini di tenarkanlah istilah “Demokrasi Terpimpin” yang merupakan hasil dari Dewan Perancang Nasional yang dibentuk berdasarkan UU No. 80 Tahun 1958 sebagai pengganti demokrasi liberal,²⁵ dengan tujuan hendak menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang yang meliputi berbagai macam dinamika kemasyarakatan.

Sistem Demokrasi Terpimpin didasarkan pada aliansi partai-partai, sementara Tentara dan Presiden sebagai pihak ketiga, yang kerangka operasionalnya sering disebut dengan apa yang dinamakan “NASAKOM” (Nasionalisme, Agama dan Komunis).

Setelah melalui rekayasa politik yang maha canggih di mana pada tahun 1965 telah terjadi drama politik yang menghancurkan kekuatan politik Soekarno. Peristiwa ini menandai kemenangan kubu kapitalis-modernis di Indonesia melalui bangkitnya pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Keberhasilan kubu kapitalis-modernis ini dipertajam dengan diperintahkannya Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pada tanggal 11 Maret 1966 yang berujung pada penyerahan asumsi kekuasaan secara penuh pada tanggal 20 Februari 1967.²⁶

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa pertarungan politik yang terjadi tidak semata-mata berakar karena adanya perbedaan kepentingan dari berbagai kelompok intern. Lebih dari itu konflik-konflik tersebut pada

²⁵ Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisus, 1991) hlm.1052

²⁶ *Ibid*, hlm.1054

ideologi kolonialisme yang berkembang di negara-negara Asia, terutama Indonesia. Dalam menerapkan konsep tersebut, Soekarno relatif mengembangkan suatu sistem ideologi nasionalisme yang jauh berbeda dengan ideologi nasionalisme yang sudah berkembang sebelumnya di Barat. Soekarno mempunyai komitmen konseptual yang tertuju pada terbentuknya doktrin kebebasan. Nasionalisme dalam konteks ini adalah membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas. Baik tertindas akal pikirannya, hak-haknya, maupun jiwa dan raganya.

Dalam pidato-pidatonya, Soekarno senantiasa mengingatkan akan pentingnya arti kemerdekaan. Karena hanya dengan kemerdekaanlah bangsa Indonesia mempunyai kebebasan dan berhak untuk mengatur perjalanan negaranya sendiri. Negara yang merdeka senantiasa mengakui kebebasan setiap individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama demi kelangsungan kehidupan negaranya. Kebebasan tersebut haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri (yang tidak menyukai unsur penindasan apapun) serta pengenalan realitas bangsanya di mana ia berada. Sehingga Nasionalisme dalam konteks inilah yang akan membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas menuju manusia yang utuh. Manusia utuh adalah manusia

b. Berfikir secara kritis mengenai *nasib diri sendiri dan nasib negara*.

Jadi, dijadikan person yang sadar, dan aktif beraksi membangun dunia sekitarnya.²⁹ Sebagaimana tentang pendidikan yang bebas, Dr. Paulo Freire mengungkapkan bahwa, pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah pendidikan yang mampu menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi dan mampu pula mengarahkan serta mengendalikan perubahan itu. Dia mencela jenis pendidikan yang memaksa manusia menyerah kepada keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia sehingga mampu mengubahnya.³⁰ Sistem pendidikan yang demikian dalam konteks yang lebih luas dapat juga dimaknai sebagai upaya emansipatoris yang lebih mengarah pada kebebasan; yaitu bebas dari keterbelakangan dan macam-macam belenggu sosial yang menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Karena masalah emansipasi adalah masalah manusia dan masalah politik *nation-state*, maka wawasan nasionalisme mengenai dunia pendidikan itu jelas diperlukan.

²⁹ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), Cet. 1, hlm. 110

³⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan*, dalam Muslih Usa, (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 22

Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan Barat sekuler, terutama karena pendidikan Islam tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia dalam menuju *kemaslahatan* umum atau *humanisme universal*. Pendidikan Islam pada akhirnya bermuara pada pembentukan manusia sesuai dengan *kodratnya* yang menyangkut dimensi *imanensi* (horizontal) dan dimensi *transendensi* (vertical; hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Pencipta).³¹

2. Latar Belakang Konsep Nasionalisme pendidikan Soekarno

Imperialisme Belanda makin lama makin mengembangkan sayapnya serta memperkuat kedudukannya di negara Indonesia sehingga berdampak pada pengambilan kekayaan negara berupa bahan-bahan untuk berbagai pabrik di Eropa.³² Di Samping mengeruk kekayaan, negara-negara Eropa juga berlomba-lomba mencari pasaran hasil industrinya di daerah-daerah di benua Asia termasuk Indonesia. Dalam pandangan mereka Indonesia digolongkan sebagai kawasan yang penting karena memiliki kekayaan bahan mentah yang berlimpah, terdapat tenaga buruh yang murah serta mempunyai letak yang strategis sebagai jalur perdagangan.³³ Hal mendasar yang dibidik soekarno adalah, bahwa bangsa Indonesia masih merupakan bangsa yang mayoritas masih berjiwa tradisional dengan wawasan yang rendah. Pendidikan yang

³¹ *Ibid.*,

³² Solichin Salam, *Op. Cit*, hlm.47

³³ Hardi, *Api Nasionalisme, Cuplikan Pengalaman*, (Jakarta: Gunung Agung,1983), hlm.9

“Impor dari Japan suatu rahmat bagi Marhaen?”, yang banyak mengupas tentang antinya terhadap imperialisme dan kapitalisme.³⁶

Keinginan untuk bebas dan merdeka adalah keinginan setiap warga negara pada saat itu, yang pada akhirnya berbagai gerakan masyarakat terutama para pemuda Indonesia bermunculan. Gerakan tersebut adalah pertemuan para pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1926, 20 Februari 1927 dan tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.³⁷ Dan sekaligus dinyanyikan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman.³⁸ Ikrar para pemuda Indonesia itu menunjukkan suatu kebesaran jiwa yang lahir secara spontan, tanpa paksaan dan hanya didorong oleh kesadaran jiwa yang luhur.

3. Konsep Nasionalisme pendidikan Soekarno

Dalam rangka mengorbankan api semangat yang ada pada dirinya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dia telah banyak menelurkan beberapa pemikiran tentang bentuk dan corak nasionalisme yang merupakan suatu kebutuhan dalam mencapai Indonesia merdeka. Beberapa corak sekaligus substansi pemikiran Nasionalisme Soekarno yang bermuara pada nilai- nilai pendidikan itu antara lain:

³⁶ Hardi, *Op. Cit*, hlm.11

³⁷ M. Sidky Daeng Materu, *Sejarah Pergerakan Nasuional Bangsa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gunung agung, 1985), hlm.112-115

³⁸ *Ibid*, hlm.116

a. Humanisme

Rasa kemanusiaan akan menimbulkan kasih sayang dan toleransi di antara sesama. Perasaan-perasaan itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan nasionalisme Soekarno. Menurutnya, nasionalisme yang sejati bukan semata-mata atau copi tiruan nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan.³⁹ Nasionalismenya ialah sama dengan “rasa kemanusiaan”.⁴⁰ Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberi cinta pada lain-lain bangsa.⁴¹

Nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan hidupnya sebagai bakti.⁴² Nasionalisme dibutuhkan unsure keberanian dan berkorban untuk bangsa. Penderitaan bangsa Indonesia di bawah kolonialisme Barat memberikan pengaruh terhadap warna nasionalisme yang diyakininya, yaitu nasionalismeku adalah perikemanusiaan dalam memperjuangkan kemerdekaan.⁴³ Nasionalisme soekarno diisyaratkan sebagai upaya membangunkan bangsa bodoh dan tertinggal menuju ketinggian akal, hati dan pengetahuan.

³⁹ Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, hlm 5

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 113

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 112

⁴² *Ibid.*, hlm. 5

⁴³ Nazaruddin Syamsuddin (ed.), *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 40

mana ia kemudian berani membela tanah air yang memberikan kepada ia segala kemungkinan untuk hidup.⁴⁶

Hal ini membuktikan komitmen Soekarno dalam mengupas suatu konsep tertentu, dia secara aktif memberikan feedback yang konstruktif dan otentik dengan tetap konsis pada karakternya sebagai seorang Soekarno plus atribut yang disandanginya.

c. Pembebasan

Munculnya nasionalisme pada dasarnya karena kebutuhan bersama dalam hidup bernegara untuk mencapai kemerdekaan. Perbudakan harus dilenyapkan dari negara Indonesia dan merubah menjadi semangat perjuangan. Karena perbudakan inilah yang menyebabkan imperialisme berdiri dengan gagah perkasa, semangat perbudakan inilah yang harus digugurkan dan diganti dengan semangat perlawanan. Sosio-nasionalisme menganjurkan pencarian kemerdekaan sebagai salah satu alat mengurangi rasa ketidak mampuan(rendahnya daya pikir dan pengetahuan, ketertinggalan) di dalam masyarakat kita.⁴⁷ Nasionalisme Soekarno mengarah pada keinginan untuk bangkit serta lepas dari belenggu yang menyengsarakan karena kebodohan yang memang diciptakan oleh para penjajah. Kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk

⁴⁶ Ruslan Abdulgani, *Nation and Character Building Republik Indonesia*, (Seksi Penerangan KOTI, 1965), hlm. 12 seperti dikutip Badri Yatim, *Op. Cit.*, hlm. 62

⁴⁷ Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, hlm. 189

menghilangkan kapitalisme dan imperialisme sekaligus syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna.⁴⁸

Sebagaimana yang dikutip Dawam Raharjo, bahwa buku yang ditulis oleh Soekarno dengan judul “Sarinah” juga telah banyak menyinggung tentang kaum perempuan yang tertindas oleh gerakan kapitalisme dan imperialisme, sehingga mereka harus dibebaskan”⁴⁹. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan nasionalisme benar-benar telah memasyarakat yang tidak hanya memandang obyek penindasan yang dalam hal ini adalah kaum perempuan, tapi lebih pada nuansa kemanusiaan dan kesadaran akan heteroginas masyarakat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Mengenai kemerdekaan berfikir, Bung Karno berpendapat bahwa: “merdekakanlah tuan punya pikiran, tuan punya roh, tuan punya ilmu”⁵⁰ Bung Karno sangat menentang terhadap pembelengguan akal dan menghendaki agar kita memerdekakan akal.⁵¹

d. Demokratisasi

Dalam konteks demokrasi, Soekarno berpendapat bahwa sosio-demokrasi adalah timbul karena sosio nasionalisme. Sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga

⁴⁸ Sukarno, *Mencapai Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm. 42

⁴⁹ Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), hlm. 144. 48 Solichin Salam, Op. Cit, hlm. 168.

⁵⁰ Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), hlm. 144. 48 Solichin Salam, Op. Cit, hlm. 168

⁵¹ *Ibid*

keadaan yang kini pincang menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang celaka dan tidak ada kaum yang sengsara.⁵²

Menurut Soekarno, demokrasi mengandung tiga unsur pokok, yakni prinsip mufakat, prinsip perwakilan dan prinsip musyawarah.⁵³ Demokrasi yang dianjurkan oleh Bung Karno adalah demokrasi yang mempunyai dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Dalam pandangannya tentang demokrasi Soekarno mengatakan: “Kalau mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-economische democratie, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.”⁵⁴ Nasionalisme dan demokrasi yang dianut oleh Dawam Rahardjo, “Bung Karno Sebagai Pemikir Islam”, dalam Indonesia haruslah memberi tempat yang aman bagi kaum kecil yang disebutnya sebagai marhaen, yaitu kaum yang melarat karena penghisapan kolonial tetapi masih tetap memiliki alat-alat kecil untuk berproduksi.⁵⁵

e. Pluralisme

Nasionalisme Indonesia atau nasionalisme Indonesia Modern tidak dibatasi oleh suku, bahasa, agama, daerah dan strata sosial. Nasionalisme

⁵² Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I., hlm. 175

⁵³ Sukarno, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 70

⁵⁴ Aristides Katopp (ed.), *80 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 28

⁵⁵ Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *Op. Cit*, hlm. 44

kita memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.⁵⁶ Nasionalisme Indonesia tidak mengenal keborjuisan dan keningratan.⁵⁷ Rakyat sekarang harus mempunyai kemauan dan keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukanya persamaan tubuh, bukannnya pula batas-batas negeri yang menjadi bagsa itu.⁵⁸

f. Persatuan

Dalam pidatonya yang bersejarah di mana kemudian dikenal dengan Lahirnya Pancasila, ia mengemukakan bahwa bangsa itu ialah – dipengaruhi oleh ide pemikir Prancis, Ernest Renan – kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri satu, dan mau bersatu.⁵⁹ Bangsa merupakan suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Nasionalisme itu ialah suatu iktikad; suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan satu bangsa, karena itu, kami mengusahakan adanya persatuan bangsa.⁶⁰

Nasionalisme pada hakekatnya mengecualikan segala pihak yang tidak ikut mempunyai “keinginan hidup menjadi satu”.⁶¹ Kemerdekaan hanyalah suatu susunan dan usaha persatuan yang harus dikerjakan rakyat

⁵⁶ Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I*, hlm. 76

⁵⁷ Sukarno, *Mencapai Indonesia Merdeka*, hlm. 83

⁵⁸ *Op. Cit.*, hlm. 3

⁵⁹ Soekarno, “*Lahirnya Pancasila*”, dalam Mr. Soeparjo (eds.), *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, (Civics)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1962), hlm. 298, sebagaimana di kutip Badri Yatim, *Op. Cit.*, hlm. 60

⁶⁰ *Loc. Cit*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 4

secara terus-menerus dengan habis-habisan mengeluarkan keringat, membanting tulang dan memeras tenaga.⁶²60 Tiada kemerdekaan tanpa persatuan bangsa.⁶³

Akibat perpanjangan tangan nasionalisme imperialisme Barat terhadap tanah jajahan – termasuk kawasan Asia, khususnya Indonesia – telah menghadapkan Soekarno pada suatu kebutuhan histories, yakni kebutuhan akan ikatan kesatuan dalam bentuk hasrat dan keinginan hidup bersama berdasarkan pada eksistensi suatu perasaan solidaritas yang besar untuk terus menyatu.

Beberapa pemikiran Soekarno tersebut muncul di tengah perkembangan nasionalisme Barat yang menafikan terhadap asas kelompok kultur, agama, atau suku bangsa sebagai unsur di dalam nasionalisme yang universal. Nasionalisme tersebut justru menjadi satu policy yang didasarkan atas kekuatan dan ambisi pribadi sehingga dalam perkembangannya tumbuh menjadi bentuk nasionalisme imperialisme yang bersifat non-humaniter (tanpa nilai kemanusiaan). Itulah sebabnya Soekarno kemudian membagi nasionalisme menjadi dua, yaitu nasionalisme Barat dan nasionalisme Timur.⁶⁴

⁶² Sukarno, *Indonesia Menggugat*, hlm. 108

⁶³ Endah Dwi Pratiwi (ed.), *Soekarno, Indonesia Menggugat*, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001), hlm. 211.

⁶⁴ Badri Yatim, *Op. Cit*, hlm. 64

kagum terhadap segala isi alamnya, rasa ingin mengembalikan harkat diri mereka dan melepaskan diri dari cengkraman tangan asing. Sehingga kemerdekaan adalah sebuah keharusan, agar dapat lebih leluasa mendirikan suatu masyarakat baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme.⁶⁹ Dan nasionalisme yang sama dengan rasa kemanusiaan.⁷⁰ Jadi Nasionalismenya tidak membenci bangsa-bangsa lain. Ia adalah nasionalisme yang akan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme yang menghargai bangsa lain dan tidak akan merendahkan atau mengecilkan bangsa lain, karena sifat yang demikian tidaklah berbeda dari sifat kaum kolonial.

Soekarno menanamkan faham kebangsaan sebagai nasionalisme Timur atau ke-Timuran yang mempunyai nilai lebih tinggi daripada imperialistis nasionalisme Barat yang selalu berkonflik satu dengan lainnya.⁷¹ Sebagaimana negara lainnya, Indonesia memiliki bentuk nasionalisme yang sesuai dengan letak geografisnya sebagai personal negara Asia Tenggara. Ia lahir bukan sebagai kado sementara, akan tetapi ia lebih proses kausalitas yang tak lepas dari dinamika historis.

Nasionalisme mulai menunjukkan pubersitasnya ketika masa memasuki awal perang Pasifik yang ditandai dengan masuknya ideologi fasisme Jepang. Selama masa pendudukan Jepang nasionalisme menjadi semakin militan, terutama karena adanya pengaruh dari pengalaman perang

⁶⁹ Sukarno, *Mencapai Indonesia Merdeka*, hlm. 41

⁷⁰ *Op. Cit.*, hlm. 113

⁷¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 41

dan militerisme Jepang. Soekarno menguatkan ilustrasi diatas lewat pidatonya di depan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 1 juni 1945 yang mengajukan lima asas yang lebih dikenal dengan sebutan Pancasila sebagai landasan filosofi dan politik negara kebangsaan (nation-state). Ia menghilangkan referensi apapun yang berbau ideologi Jepang. Soekarno cenderung menyetir pendapat Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa pada hakekatnya nasionalisme adalah kemanusiaan.⁷²

Nasionalisme yang berperikemanusiaan berarti nasionalisme yang memberi tempat bagi aliran-aliran lainnya. Islam meskipun tidak mengenal batas-atas negara karena prinsipnya yang utama adalah persaudaraan antar manusia, tetapi ia tidak menentang nasionalisme. Seperti Marxisme adalah aliran yang mendasarkan diri pada materialisme atau kebendaan, tapi sangat menentang penindasan. Jadi meskipun nasionalisme yang bersifat cinta tanah air dan bangsa, Islam yang mendasarkan diri pada keyakinan agama atau bersifat spiritual sedang marxisme yang mendasarkan diri pada materialisme atau kebendaan, tetapi karena ketiga-tiganya mengalami latar belakang sejarah politik yang sama yaitu penjajahan, menurut Soekarno, penyatuan ketiganya dapat menjadi roh perjuangan atau kekuatan inti perjuangan.⁷³ Dan penyatuan tersebut tentunya tidak mengharuskan orang berpindah ideologi,

⁷² Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1, hlm. 113

⁷³ Badri Yatim, *Op. Cit.*, hlm. 88-89

yang Islam tetap memegang Islamnya, demikian pula yang nasionalis ataupun yang marxis.

Islam sendiri menghendaki nasionalisme yang bukan untuk menyombongkan diri, jatuh menjatuhkan dan bukan untuk merusak hidup berjama'ah dan bermasyarakat.⁷⁴73 Karakteristik nasionalisme Indonesia di atas, bukan saja di sebabkan oleh posisi Indonesia yang merupakan bagian dari dunia Timur, tetapi lebih dari itu pergerakan-pergerakan militan di Indonesia menurut Soekarno terlahir terutama karena “wahyu” nya pergerakan-pergerakan di Asia secara umum. Menurutnya: “Letusan meriam di Thusima telah membangunkan penduduk Indonesia, memberitahukan bahwa matahari telah tinggi, serta memaksa penduduk Indonesia terus bekejar-kejaran dengan bangsa asing menuju padang kemajuan dan kemerdekaan – bahwa benih-benih yang di taburkan oleh Mahatma Gandhi di kiri kanan sungai Ganges tidak hanya tumbuh di sana, melainkan setengah dari padanya telah di terbangkan angin menuju khatulistiwa dan di sambut oleh bukit barisan yang melalui segala nusa Indonesia serta menebarkan biji itu di sana”.⁷⁵

Sebagai suatu gerakan yang diwahyui atau diilhami oleh gerakan-gerakan di negeri-negeri Asia, maka Soekarno kemudian melihat bahwa

⁷⁴ Isa Anshori, *Islam dan Nasionalisme*, Sebagaimana dikutip Dwi Adi Satrianto dalam Skripsi, *Pemikiran Nasionalisme Soekarno dan Haji Agus Salim*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 1990), hlm. 17, td. ⁷⁴ Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1 hlm 74

⁷⁵ Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1 hlm 74

prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Timur, kemudian dimiliki juga oleh gerakan nasionalisme Indonesia. Kalau Soekarno menyebutkan, bahwa gerakan nasionalisme di dunia timur berkawinan dengan Marxisme, dan membentuk nasionalisme baru, maka nasionalisme baru inilah yang hidup dikalangan rakyat Indonesia.

Kelahiran nasionalisme Indonesia khususnya dan nasionalisme Asia Tenggara pada umumnya secara mendasar muncul sebagai suatu reaksi terhadap kolonialisme Eropa. Nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno mencerminkan rasa antinya terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dan dalam bahasa lugasnya, bahwa nasionalisme yang dikehendaki Soekarno adalah rumusan ideologi nasionalisme yang digali dari nilai-nilai luhur falsafah hidup bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang ber-Ketuhanan, nasionalisme yang berkemanusiaan, yang dapat hidup dalam taman sari internasionalisme yang mengalami adanya kedaulatan rakyat dan yang mencita-citakan terwujudnya sebuah keadilan sosial.

Bung Karno mengajukan ideologi nasionalisme sebagai prasarat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini didasarkan pada realitas politik bahwa bangsa Indonesia memerlukan ideologi yang dapat mengikat dan mewadahi kemajemukan (pluralisme). Tulisannya dalam Suluh Indonesia Muda tahun 1926, "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" telah mengungkapkan dasar pemikirannya. Nasionalismenya adalah nasionalisme

yang hidup berdampingan dengan Islam dan Marxisme. Dia berkeyakinan bahwa ke tiga ideologi yang mewarnai masyarakat ini saling mengisi; penyatuan antara ke tiganya akan merupakan kekuatan besar dalam menghadapi kolonialisme dan mempunyai tujuan yang sama yaitu Indonesia Merdeka.⁷⁶

Penjajah menyebabkan kesengsaraan, mencekik serta menyumbat vitalitas dan sumber kesejahteraan bangsa. Menjadikan manusia bukan lagi sebagai sumber daya akan tetapi sebagai komoditi, memecah belah dan memperbodoh rakyat. Penjajah yang ada di Indonesia mematikan kreatifitas, persatuan dan menenggelamkan semua keinginan rakyat Indonesia yang bebas. Pendidikan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berasal dari golongan bangsawan atau priayi yang mau berkolaborasi dengannya. Bahkan etnisitas, suku maupun ras menjadi penghalang untuk bisa hidup rukun dan sejahtera.

Soekarno menyadari bahwa penguasa Kolonial Belanda melakukan tindakan ketat di dalam politik pendidikan. Belanda sama sekali menutup pintu pendidikan bagi rakyat dan mengadakan berbagai peraturan di bidang ekonomi untuk memanfaatkan tenaga rakyat. Mereka sebaliknya lebih suka memberikan pendidikan elit bagi segelintir pribumi terpilih.⁷⁷

⁷⁶ Badri Yatim, *Op. Cit.*, hlm. 87-88

⁷⁷ Bob Hering, “*Biografi dan Kepribadian Soekarno Pendiri Republik Indonesia*”, dalam Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), hlm. 56

Namun kesemuanya itu tidak berlaku lagi ketika gerakan nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno sudah memasuki ke dalam sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia. Terlebih ketika kemerdekaan Republik Indonesia sudah tercapai melalui jiwa patriotisme dan ditambah Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia, maka tidak ada istilah “pendidikan milik para priayi dan bangsawan”. Semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Apalagi ketika Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan yang pertama mengeluarkan Intruksi Umum kepada guru supaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme.⁷⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kolonial yang hanya melayani kaum elit masyarakat yang siap dipekerjakan untuk sebuah kekuasaan status quo dan menjauh dari realitas budaya bangsa tidak terpakai lagi . Yang dikedepankan adalah jiwa patriotisme sebagai salah satu paradigma Nasionalisme. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan harus didudukkan pada fungsi yang benar, yaitu menuju pada kemandirian, pengenalan jati diri, dan kebebasan, disamping menanamkan disiplin patriotisme dan nasionalisme yang tidak sempit.⁷⁹ Hal ini karena konsep nasionalisme merupakan dorongan yang mendasar dalam pengaktualisasian pendidikan humanisme yang mengarah pada eksistensi manusia merdeka, merdeka geraknya, merdeka lahir

⁷⁸ H. A. R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1995), hlm. 70-71

⁷⁹ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977), Cet. 1, hlm. 3

batinnya, sekaligus merdeka alam fikirnya. Seperti yang disampaikan Soekarno bahwa: “bangsa yang merdeka akan mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang merdeka”.⁸⁰

Pendidikan yang sejati merupakan upaya yang sistematis untuk pembebasan yang permanen dari berbagai macam keterbelengguan (belenggu dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, penindasan dan lain-lain), sehingga individu bisa menjadi pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya, mampu bertanggung jawab dan mandiri sehingga menjadi manusia yang utuh.

Nilai-nilai pendidikan yang tertuang dalam nasionalisme, pada dasarnya tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam dalam UUD 1945. Karena disana disebutkan dengan segala kesanggupannya dan keinginannya berusaha mewujudkan kehidupan rakyat yang cerdas serta menjanjikan adanya keadilan sosial secara merata.⁸¹

Pendidikan turut menentukan jatuh banggunya bangsa ini, sehingga pendidikan diharapkan mampu memanusiakan, membudayakan dan meng-Indonesiakan anak bangsa. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua buah bidang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena pendidikan adalah suatu usaha manusia yang penting untuk memelihara, mempertahankan

⁸⁰ Solichin Salam, *Op. Cit.*, hlm. 233

⁸¹ Sarino Mangun Pranoto, *Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kmerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), hlm. 24

dan mengembangkan keberadaan masyarakat yang berbudaya.⁸² Sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar dari pendidikan, sementara pendidikan diharapkan mampu mendukung pengembangan kebudayaan nasional.⁸³

Dalam hal pendidikan dan kebudayaan, Soekarno mengatakan bahwa: Saya berusaha mendidik anak-anak saya untuk mencintai Indonesia. Saya memberikan pendidikan tradisional Indonesia kepada mereka agar supaya mereka lebih mengetahui tentang negerinya. Dengan tradisional, saya maksudkan bukan yang dimasukkan dari luar. Sampai sekarang telah enam tahun ketiga putrid-putri saya turut serta dalam pertunjukanpertunjukan kesenian hari proklamasi.

Mengapa tidak berdansa twist, rok'n rol, ballet Barat. Saya melarang mereka. Saudara bisa membayangkan betapa tarian-tarian Indonesia itumemerlukan ketekunan, kerajinan dan kekuatan, sehingga bisa banyak mencururkan keringat. Akan tetapi saya menginginkan anak-anak saya merasa bangga akan negerinya.⁸⁴

Begitulah caranya Bung Karno mendidik putra-putrinya untuk menjadi patriot Indonesia sejati yang berbudaya, yang harus mengedepankan pada perasaan memiliki terhadap bangsa dan bertanggungjawab serta menjaga kemurniaan budaya dengan senantiasa memegang norma serta nilai-nilai luhur

⁸² H. Soedijarto, *Pendidikan Sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 91

⁸³ *Ibid.*, hlm. 95

⁸⁴ Solichin Salam, *Op. Cit*, hlm. 212-213

falsafah hidup bangsa. Karena bagaimanapun juga budaya bangsa Indonesia adalah kebanggaan bersama, walaupun kemajemukan suku, etnis serta agama yang dianutnya. Karena dalam pandangan Soekarno kemajemukan pada dasarnya bukan penghalang bagi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara, apalagi suku bangsa yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan emosional sebagai bekas jajahan kolonial Hindia Belanda.⁸⁵

Kepada putra-putrinya, Bung Karno juga selalu mendidik agar anak-anaknya berbakti dan hormat kepada ibu/ bapak dan guru. Dan perhatian Presiden Soekarno tidak terbatas hanya pada putra-putrinya saja akan tetapi juga pelayanan Istana, masyarakat yang pernah dijumpai maupun para mitra kerjanya pada saat itu.⁸⁶

Sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa ajaran maupun nasionalisme Soekarno banyak mengandung nilai pembelajaran dan pendidikan humanisme. Nilai patriotis muncul didasari oleh keberanian dan sifat kemanusiaan yang tinggi. Keberanian dengan rasa kemanusiaan akan mampu merubah tatanan kehidupan yang serba terbelakang menjadi tatanan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan. Sehingga di dalam perkembangannya sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari segi pengetahuan maupun ketrampilan. Dari sinilah kemudian

⁸⁵ J. Kartini Soedjenro, *Pancasila Dinamisator NKRI, Suara Merdeka*, Semarang, 14 Agustus 2003, hlm. VI

⁸⁶ Solichin Salam, *Op. Cit.*, hlm. 214

pendidikan sangat berperan untuk membimbing sekaligus mengarahkan untuk menjadi manusia utuh dan beradab.

Konsep nasionalisme Soekarno yang demikianlah, diharapkan mampu mengimplementasikan makna pendidikan wawasan kebangsaan ke dalam system birokrat yang demokratis, sehingga terciptalah sistem interdependensi perkembangan antar pulau, suku dan etnik, dengan tetap mengembangkan secara empiric desentralisasi dan demokratisasi ke segala bidang. Demikianlah sedikit ilustrasi tentang tumbuh dan kembangnya nasionalisme Indonesia, yang dalam hal ini tidak bisa di kesampingkan dari kontribusi pemikiran Soekarno.

Sementara itu nasionalisme Indonesia modern mulai muncul dalam bentuk gerakan pendidikan dan kebangkitan kebudayaan. Ia lebih mencerminkan suatu keberangkatan dari masa lampau, dalam artian mereka meninggalkan militerisme dalam memerangi kekuatan otoritas karena superioritas kekuasaan mereka. Dalam menunjukkan kontinuitasnya dengan masa lampau, nasionalisme Indonesia modern ini di yakini akan dapat memberi ornamen baru bagi perkembangan nasionalisme Indonesia di masa yang akan datang.

dan siap hidup bermasyarakat untuk mencapai keharmonisan, perdamaian dan persatuan dengan prinsip cinta sesame.

Berikut ini ulasan tentang beberapa poin nasionalisme pendidikan antara Nasionalisme Pendidikan Soekarno dengan Pendidikan Islam yang memiliki daya sinkronisasi.

1. Nasionalisme Soekarno Sebagai Paradigma Pembebasan

Secara fundamental munculnya nasionalisme Soekarno adalah berdasarkan pada konsep keinginan untuk bebas dari keterbelungguan ideology kolonialisme yang berkembang di negara-negara Asia, terutama Indonesia. Dalam menerapkan konsep tersebut, Soekarno relatif mengembangkan suatu sistem ideologi nasionalisme yang jauh berbeda dengan ideologi nasionalisme yang sudah berkembang sebelumnya di Barat. Soekarno mempunyai komitmen konseptual yang tertuju pada terbentuknya doktrin kebebasan. Nasionalisme dalam konteks ini adalah membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas. Baik tertindas akal pikirannya, hak-haknya, maupun jiwa dan raganya. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno senantiasa mengingatkan akan pentingnya arti kemerdekaan. Karena hanya dengan kemerdekaanlah bangsa Indonesia mempunyai kebebasan dan berhak untuk mengatur perjalanannya sendiri. Negara yang merdeka senantiasa mengakui kebebasan setiap individu maupun kelompok dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama demi kelangsungan kehidupan negaranya. Kebebasan tersebut haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri (yang tidak menyukai unsur penindasan

apapun) serta pengenalan realitas bangsanya di mana ia berada. Sehingga Nasionalisme dalam konteks inilah yang akan membangun segenap keadaan realitas manusia tertindas menuju manusia yang utuh. Manusia utuh adalah manusia sebagai subyek,¹ dimana dirinya mampu berperan aktif dalam setiap kesempatan.

Oleh karenanya pendidikan yang sesuai dengan konsep nasionalisme ini adalah pendidikan yang bebas, dimana peserta didik itu bukan milik para pengajar dan para *planner* dalam proses sosial pendidikan, akan tetapi secara *prestise* mereka menjadi pasangan bermain atau *ko-partner*. Dalam hal ini pelaku pendidikan tadi adalah sebagai *subyek-subyek* bukan *subyek-obyek*. Sehingga proses ditempatkan sebagai sebuah harmoni yang keduanya secara bersama-sama mengamati realitas. Yang diharapkan dari proses ini adalah bagaimana rakyat tidak hanya berkembang secara otentik dan *non periodic* akan tetapi juga kontinu. Karena pada dasarnya apa yang ada sebagai pengetahuan, teknologi, pendidikan, secara seksama diperuntukkan bagi rakyat dan anak didik guna diaktualisasikan sebagai instrumen belajar hidup ditengah-tengah realitas zaman dilingkungannya yang serba kompleks. Mengenai hal ini agaknya Konsep pendidikannya Dr. Kartini Kartono dapat dijadikan rujukan, yang menyatakan bahwa rakyat dan anak didik itu hendaknya tidak dikondisikan menjadi pelaku-pelaku yang pasif dan apatis, akan tetapi system pendidikan didorong untuk:

¹ Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hlm 4.

- a. Berkembang dengan bebas, dan kreatif aktif.
- b. Berfikir secara kritis mengenai *nasib diri sendiri dan nasib negara*. Jadi, dijadikan person yang *sadar*, dan aktif beraksi membangun dunia sekitarnya.² Sebagaimana tentang pendidikan yang bebas, Dr. Paulo Freire mengungkapkan bahwa, pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah pendidikan yang mampu menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi dan mampu pula mengarahkan serta mengendalikan perubahan itu. Dia mencela jenis pendidikan yang memaksa manusia menyerah kepada keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia sehingga mampu mengubahnya.³

Sistem pendidikan yang demikian dalam konteks yang lebih luas dapat juga dimaknai sebagai upaya emansipatoris yang lebih mengarah pada kebebasan; yaitu bebas dari keterbelakangan dan macam-macam belenggu sosial yang menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Karena masalah emansipasi adalah masalah manusia dan masalah politik *nation-state*, maka wawasan nasionalisme mengenai dunia pendidikan itu jelas diperlukan.

Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan Barat sekuler, terutama karena pendidikan Islam tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia

² Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), Cet. 1, hlm. 110

³ Ahmad Syafii Maarif, *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan*, dalam Muslih Usa, (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 22

dalam menuju *kemaslahatan* umum atau *humanisme universal*. Pendidikan Islam pada akhirnya bermuara pada pembentukan manusia sesuai dengan *kodratnya* yang menyangkut dimensi *imanensi* (horizontal) dan dimensi *transendensi* (vertical; hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Pencipta).⁴

Konsepsi Islam tentang pembebasan sesuai misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ajaran “Tauhid” sebagai salah satu kunci pokok ke-Islaman, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada *perhambaan/ penyembahan* kecuali hanya kepada Allah SWT, bebas dari belenggu kebendaan dan kerohanian. Dengan kata lain; seseorang yang telah mengikrarkan diri dengan “dua kalimat syahadah” berarti melepaskan dirinya dari belenggu dan subordinasi apapun.⁵

Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan.⁶ Al-Qur’an telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. Dalam firman Allah: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo’a: “*Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari*

⁴ Muslih Usa, ed., *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 31

⁵ *Ibid.*, hlm 31

⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. 1, hlm. 33

sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (An-Nisa': 75)⁷

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa Allah mengingatkan udzur apakah yang telah menghalangi kita untuk berperang demi menolong orang-orang lemah.⁸

Dari ayat ini kita lihat bahwa Al-Qur'an mengungkapkan sebuah teori yang disebut "*kekerasan yang membebaskan*".⁹ Para penindas dan eksploitor menganiaya golongan lemah dan dengan seandainya menggunakan kekerasan untuk mempertahankan mereka. Tidak mungkin kita dapat membebaskan penganiayaan ini tanpa melakukan perlawanan. Islam mengakui dan melindungi kebebasan manusia, karena manusia itu diberkahi martabat dan dilengkapi dengan kemampuan berfikir yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain.¹⁰ Namun kebebasan tersebut mempunyai batas tertentu atau tidak mutlak, karena kemutlakan itu hanya milik Allah.

Pendidikan secara kodrati adalah sebagai instrumen yang membawa pribadi kepada penentuan diri menuju pada kemandirian, pengenalan jati diri dan kebebasan dari keterbelungguan marginalitas. Pendidikan Islam sebagai pranata sosial, juga sangat terikat dengan pandangan Islam tentang hakekat keberadaan (*eksistensi*) manusia. Oleh karena itu pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan

⁷ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 131

⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, terj. Bahrn Abubakar, LC, et.al, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), Cet. 1, hlm. 151

⁹ *Op. Cit.*, hlm 34

¹⁰ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), Cet. 1, hlm. 139

Allah. Pembedanya adalah kadar ketaqwaan, sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mempunyai nilai pembebasan terhadap belenggu-belenggu kebodohan yang berdampak pada matinya kreatifitas maupun belenggu marginalitas. Namun kebebasan tentu ada batasnya. Kebebasan tanpa batas akan berbenturan dengan hak-hak orang lain dan pada akhirnya menimbulkan *anarki* disetiap lini kehidupan. Karena tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah agar anak didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah. Itu berarti kebebasan disini dibatasi oleh hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah agar dijadikan pegangan untuk menjadi manusia yang bertaqwa.

Setidaknya terdapat arah pandang yang sama antara akar nasionalisme yang dikembang oleh Soekarno dengan nilai pendidikan Islam yaitu pembebasan manusia dari belenggu keduniaan. Yaitu pemberdayaan manusia merdeka, merdeka fikirnya, merdeka gerakannya, merdeka tenaganya dan merdeka lahir batinnya, yang esensinya adalah mengeksistensikan manusia sebagai makhluk sempurna secara empiris. Hal ini tidak menyimpang dari orientasi pendidikan Islam, yakni membentuk manusia menjadi “Insan Kamil”.¹¹ Hanya bedanya dalam konteks nasionalisme, kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau negara, dalam hal ini Indonesia, sedang

¹¹ Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara bekerjasama dengan Dirjen Pembinaan Agama Islam Depag RI, 1991), hlm. 29

dalam konteks pendidikan Islam kebebasannya dibatasi oleh hukum dan ajaran-ajaran dari Allah SWT.

2. Patriotisme dalam Pendidikan Islam

Sebagaimana telah diuraikan di bab III tentang patriotisme merupakan salah satu substansi nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno, maka apabila semangat nasionalisme suatu bangsa perlu dibina dan dikembangkan, sebagai konsekuensi logisnya adalah patriotisme termasuk hal yang perlu dibina dan dikembangkan. Dengan demikian antara negara bangsa (*nation state*) dan nasionalisme merupakan elemen yang saling menunjang. Nasionalisme menjadi faktor penentu yang mengikat semangat serta loyalitas untuk mewujudkan cita bersama mendirikan sebuah negara bangsa. Landasan nasionalisme dibangun oleh kesadaran Sejarah, cinta tanah air, patriotisme dan cita politiknya.

Di dalam sejarah pertumbuhan bangsa-bangsa merdeka setelah perang Dunia II, Islam mempunyai peran penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme lahir dari semangat solidaritas yang dianjurkan oleh agama Islam.¹² Solidaritas ummah inilah yang menimbulkan semangat anti penjajah. Pergerakan dan perjuangan melawan kekuasaan penjajah yang muncul di Indonesia membuktikan bahwa Islam mampu menjadi faktor pemersatu dan penggerak bangsa menuju kepada ambang kemerdekaan. Islam sendiri mengajarkan tentang pentingnya patriotisme,

¹² Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 138

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "*Dan berjuanglah kamu dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu termasuk orang-orang yang berpengetahuan*". (Q.S: At-Taubah: 41).¹³

Semangat patriotisme yang ditumbuhkan oleh semangat ajaran Islam seperti pada ayat Al-Qur'an tersebut perlu terus dibina dikalangan generasi muda Islam yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Dalam Hadits Rasulullah Muhammad saw juga disebutkan: *Dar Abu Dzarr r.a berkata: Saya bertanya: Wahai Rasulullah amal-amal perbuatan apa sajakah yang paling utama?. Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan berjihad pada jalan Allah"*. (Riwayat : Bukhari dan Muslim).¹⁴

Cinta tanah air adalah fitrah manusia, cinta tanah air merupakan cinta kepada seluruh rakyat yang tinggal di atas tanah air itu.¹⁵ Implikasi dari cinta itu, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya. Sehingga muncul kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, yang lebih populer dengan istilah *ummatan wahidah*. Soekarno juga pernah menyampaikan konsep *ummatan wahidah*, saat diberi kesempatan berpidato pada Hari Raya Idul Fitri " Saya ingat, sebagai pemimpin sekarang ini, ya, Nabi kita berkata, - kalau salah minta dikoreksi, apakah itu ucapan Nabi, apakah itu ayat Qur'an, saya sudah lupa – *wa'tashimu bihablillahi wala wala*

¹³ Depag, RI, *Op. Cit*, hlm. 285

¹⁴ Abu Zakaria Yahya, *Riyadlus Shalihin*, (Semarang: CV. Toha Putra, Tanpa Tahun), hlm. 483

¹⁵ Dwi Purwoko, et.al, ed., *Negara Islam (?)*, (Jakarta: PT. Permata Aristika Kreasi, 2001), hlm. 36

tafarraqu. Itu, apakah itu Qur'an, apalagi Qur'an Saudara-saudara, *wa'tashimu bihablillahi wa tafarraqu*, Artinya, berpegang-peganglah kamu di atas jalan Tuhan. Dangan jangan bercerai berai. *Wala tafarraqu*. Jangan bercerai-cerai".¹⁶

Dalam pidato tersebut tampak jelas bahwa Paradigma nasionalisme Soekarno termasuk mengacu pada persatuan dan kesatuan dalam satu natie (ke-ika-an dalam ke-Bhineka-an), dan instrumen patriotismelah semua itu dapat tercapai. Patriotisme pada saat pembangunan dewasa ini tentu fungsionalisasinya berbeda dengan tatkala masa perjuangan menegakkan kemerdekaan dahulu. Patriotisme dalam pengertian cinta tanah air, "*hubbul wathon minal iman*", ini pada pembangunan dan pada masa reformasi seperti saat sekarang ini difungsionalisasikan dalam arti pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang merdeka segala aspek kehidupannya.

Dalam kaitanya dengan generasi muda, maka patriotisme generasi muda harus mempersiapkan diri agar dapat meneruskan perjuangan dan pembangunan nasional. Di dalam GBHN di tegaskan supaya para pemuda mempersiapkan diri agar memiliki:

- a. Kepemimpinan dan ketrampilan
- b. Kesegaran jasmani dan daya kreasi
- c. Patriotisme dan idealisme
- d. Kesadaran berbagsa dan bernegara

¹⁶ Amanat pada Hari Raya Idul Fitri di Masjid Baiturrahim, Istana Merdeka, Jakarta, 23 Januari 1966 dalam *Bung Karno dan Islam*, Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 212

- e. Kepribadian dan budi pekerti luhur
- f. Peningkatan dan perluasan partisipasi generasi muda dalam pembangunan.¹⁷

Kearah pencapaian tujuan itulah semangat patriotisme generasi muda Islam difungsionalisasikan. Dalam bab sebelumnya, tujuan khusus dari pendidikan Agama Islam yang mengarah pada penumbuhan dorongan agama dan akhlak, telah disebutkan, diantaranya menumbuhkan rasa rela, optimisme, kepercayaan diri, tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa, kasih sayang, cinta kebaikan, memegang teguh pada prinsip, berkorban untuk agama dan tanah air dan siap membelanya.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam sangat memperhatikan persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Nasionalisme Pendidikan Soekarno dan Humanisme Pendidikan Islam

Sebagai penuntun kehidupan umat manusia, agama pada prinsipnya terdiri dari nilai-nilai yang mencerminkan kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan karena itu agama menolak segala bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.¹⁹

Untuk mengkokritkan nilai-nilai tersebut, para elit agama dan tokoh-tokoh yang peduli terhadap perilaku kemanusiaan melakukan sejumlah upaya yang

¹⁷ Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 140.

¹⁸ Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bintang Terang, 1979), cet. I, hlm. 423-424

¹⁹ Qomaruddin SF (ed.), *Melampaui Dialog Agama, Abd A'la*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), Cet. 1, hlm. 10-11

mengarah kesana. Usaha itu misalnya, telah digelarnya *world conference on Religion and peace* yang ketiga di Princeton tahun 1979 yang dihadiri 338 peserta dari agama seluruh dunia termasuk Islam dengan tegas menyampaikan bahwa perdamaian merupakan persekutuan dunia (*World Community*) yang dibangun atas dasar cinta kasih, kebebasan dan kebenaran.²⁰

Sebagaimana diketahui bahwa misi utama ajaran Islam adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, dan untuk mewujudkan misi itu pendidikan Islam berada pada barisan terdepan, karena pendidikanlah yang secara langsung berhadapan dengan umat manusia. Ketentuan ini dapat dilihat dari alasan mengapa ayat yang pertama kali diturunkan berbicara tentang pendidikan, yaitu “*iqro*” yang berarti membaca. Diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Arab terbagi dalam kelompok yang kuat dan lemah. Kelompok kuat menindas dan memperbudak kelompok yang lemah, termasuk di dalamnya kaum wanita. Keberadaan kelompok yang lemah itu sengaja dipertahankan oleh kelompok yang kuat dengan cara membiarkan kelompok yang lemah itu hidup tanpa pendidikan dan ilmu pengetahuan.²¹ Dengan cara demikian kelompok tersebut dapat ditindas, diperbudak dan dijajah. Pada saat itu pendidikan dan ilmu pengetahuan hanya milik kaum elit dan tidak boleh dibocorkan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang anggap lemah.

²⁰ *Ibid.* hlm. 11

²¹ Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 100

yang dibatasi oleh kultur tertentu, nilai kebebasan, kemerdekaan dan kebahagiaan. Persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun atas fondasi individualisme dan demokrasi. Sedang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai kemanusiaan yang dibangun dari idealisasi tentang nilai baik dan benar bersifat mutlak.²³

Dalam pendidikan Islam, humanisme merupakan prinsip yang tidak pernah lepas dari materi maupun proses belajar mengajar yang diterapkannya. Karena Islam memiliki nilai universal dalam segala hal. Islam adalah *rahmamatal lil alamin*; termasuk menekankan pada pendidikan kasih sayang, menghormati dan menghargai hasil karya orang lain, kebebasan berfikir, humanisme dan pluralisme serta tidak mengenal etnisitas maupun sekterianisme.

4. Nasionalisme dan Pluralisme Pendidikan Islam

Dalam pandangan Soekarno kemajemukan (*pluralis*) pada dasarnya bukan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara, apalagi berbagai suku yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan emosional sebagai bekas jajahan kolonial Belanda. Karena dengan kemajemukan yang mempunyai latar belakang sama tersebut unsur kebersamaan dalam rangka menghadapi imperialisme dan kolonialisme dapat dibangun dalam bingkai nasionalisme.

²³ HM. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. 1, hlm. 27.

Esensi yang terkandung dalam nasionalisme secara langsung ikut mengisi suatu proses pembelajaran. Diskursus mengenai nasionalisme Soekarno dalam pandangan pendidikan Islam akan semakin persuasif ketika sistem yang menjembatannya dirujuk pada substansi ke-Islaman. Apa yang dibahas pada sub bab sebelumnya telah mengantarkan pada pendefinisian mengenai corak nasionalisme yang tidak bertentangan dengan ajaran atau pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mengakui adanya perbedaan-perbedaan individual diantara para peserta didik , baik dalam bakat, minat, kemampuankemampuan, kebutuhan-kebutuhan maupun masalah-masalah yang dihadapinya.²⁴

Secara tersirat Islam mengajarkan bahwa pluralisme bukanlah sebagai instrumen pembatas yang mengkotak-kotak ideologi dan ruang gerak mereka. Dengan adanya sistem pendidikan wawasan kebangsaan di Sekolah, maka dengan sendirinya anak didik akan tersetir ke dalam suatu perasaan sebagai unsur masyarakat, yang tanpa disadari membutuhkan bantuan orang lain, lepas dari eksistensi suku, ras dan agama. Hal ini sesuai dengan konsep Al-Qur'an yang menyatakan: *"Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT. ialah orang yang paling bertaqwa diantara*

²⁴ Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hlm. 34

*kamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui dan Maha mengena"l. (Al-Hujurat: 13).*²⁵

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada beberapa pangkat, nasab, tubuh, dan tidak pula kepada hartamu, *akan* tetapi Allah memandang kepada hatimu.²⁶ Salah satu prasarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa, karena kemajemukan merupakan *sunnatullah* (hukum alam).²⁷

Pluralisme adalah sistem nilai yang memandang eksistensi kemajemukan secara positif dan optimis serta menerimanya sebagai suatu kenyataan dan sangat dihargai.²⁸ Al-Qur'an juga menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah (Q.S: 30: 22), sehingga untuk melindungi dan menegakkan pluralisme diperlukan adanya nilai-nilai toleransi.²⁹

Dengan diciptakannya manusia dari laki-laki dan perempuan, dan berkembag menjadi suku dan bangsa, maka tindakan yang benar adalah pergaulan yang paling harmonis di antara mereka, sekalipun berbeda bangsa dan lingkungan hidupnya. Standar baiknya pergaulan terletak di luar manusia sendiri. Hal ini

²⁵ Depag. RI, *Op. Cit*, hlm. 847

²⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op. Cit*, Juz 26, hlm. 240

²⁷ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 11

²⁸ Masykuri Abdillah, *Op. Cit*, hlm. 148

²⁹ *Ibid*, hlm. 149

untuk menginsyafkan manusia, sebagai hamba yang sama. Dalam konteks pendidikan Islam, bahwa substansi nasionalisme; seperti cinta tanah air, patriotisme, perikemanusiaan dan pembebasan merupakan persoalan mu'amalah yang termasuk dalam kategori ajaran Islam dimensi social dan kemanusiaan. Hal ini dikarenakan Islam tidak hanya menyediakan ajaran-ajaran komprehensif dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agama (*fiqh*), dogma (*tauhid*), dan etika (*akhlak*), akan tetapi juga dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dan masalah-masalah keduniawiaan.³⁰ Islam merupakan suatu pergaulan hidup yang memberi hak seimbang serta kewajiban yang sama. Peraturan yang terkandung dalam Islam sangat heterogen, dari masalah ke-Tuhanan sampai pada persoalan tatanan rumah tangga hingga mengurus hubungan dengan mereka yang berlainan agama dan berlainan negeri serta mendorong semangat untuk mencapai derajat kemanusiaan.

Dalam hal ini Mohammad Natsir sebagaimana dikutip Dwi Purwoko dalam "*Negara Islam*", mengatakan: "tidak perlu seorang muslim menghilangkan rasa kebangsaan dan kebudayaan. Karena Ajaran Islam juga mengakui bahwa manusia dijadikan dalam bergolong-golongan, bangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Hal tersebut merupakan fitrah".³¹

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan khirah;

³⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 23

³¹ Dwi Purwoko, et.al, ed, *Ibid.*, hlm. 78

antara hubungan manusia dengan Tuhan; antara hubungan manusia dengan manusia serta antara ibadah dengan urusan muamalah. Landasan hukum agama adalah bahwa segala dimensi kehidupan baik pribadi maupun kehidupan komunitas di bawah otoriterisme Tuhan. Ia secara penuh mendapatkan legitimasinya pada kekuasaan tertinggi dan kehendak Allah SWT. Komunitas tadi dipandang sebagai suatu ikatan dalam kesatuan konsep *ummatan wahidah* yang di dalamnya terdapat hukum dan peraturan (dalam bentuk muamalah) yang telah disepakati bersama. Karena Allah sendiri telah menyerukan pentingnya persatuan dalam komunitas masyarakat.. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 103: "Berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah... (QS. Ali Imran: 103)³²

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa berpegang teguh kepada kitab Allah sekaligus pada Janji Allah, di dalamnya terkandung perintah agar kita hidup rukun dan bermasyarakat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.³³ Agama memerintahkan persatuan antar kaum khususnya dalam satu negeri, meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Karena tanah air tidak akan bisa maju melainkan dengan jalan persatuan seluruh rakyatnya dan saling Bantu-membantu dalam kehidupannya.³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 93

³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op. Cit*, Juz 4, hlm. 24

³⁴ *Ibid.*, hlm. 26

Cinta tanah air adalah fitrah manusia, cinta tanah air merupakan cinta kepada seluruh rakyat yang tinggal di atas tanah air itu.³⁵ Implikasi dari cinta itu, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua yang ada di atas tanah airnya. Sehingga muncul kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih populer dengan istilah *ummatan wahidah*. Soekarno juga pernah menyampaikan konsep *ummatan wahidah*, saat diberi kesempatan berpidato pada hari Raya Idul Fitri: "Saya ingat, sebagai pemimpin sekarang ini, ya, Nabi kita berkata, - kalau salah minta dikoreksi, apakah itu ucapan Nabi, apakah itu ayat Qur'an, saya sudah lupa – *wa'tashimu bihablillahi wala wala tafarraqu*. Itu , apakah itu Qur'an, apalagi Qur'an saudara-saudara, *wa'tashimu bihablillahi wala wala tafarraqu*, Artinya, berpegang-peganglah kamu di atas jalan Tuhan. Dengan jangan bercerai berai. *Wala tafarraqu*. Jangan bercerai-cerai".³⁶

Dalam pidato tersebut tampak jelas bahwa padaradigma nasionalisme Soekarno termasuk mengacu pada persatuan dan kesatuan dalam satu natie (ke-Ika-an dalam ke-Bhineka-an), dan instrumen patriotismelah semua itu dapat tercapai. Hal ini menunjukkan tentang arti pentingnya persatuan dari berbagai komunitas masyarakat dalam kerangka persatuan dan kesatuan umat. Di sinilah

³⁵ Dwi Purwoko, et. Al, (eds.), *Negara Islam (?)*, (Jakarta: PT. Permata Aristika Kreasi, 2001), hlm. 36.

81

³⁶ Amanat Pada Hari Raya Idul Fitri di Masjid Baiturrahim, Istana Merdeka, Jakarta, 23 Januari 1966 dalam *Bung Karno dan Islam*, Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 212

salah satu nilai relevansi persatuan umat sebagai salah satu substansi nasionalisme Soekarno dengan ajaran Islam yang mengakui tentang komunitas masyarakat pluralis untuk tidak terpecah belah. Dan perintah untuk mewujudkan keharmonisan dalam kerangka persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat.

5. Nasionalisme dan Demokratisasi Pendidikan Islam

Konsep demokrasi telah pula menjalari pemikiran kaum intelektual kita pada masa-masa pergerakan, termasuk Soekarno. Tidaklah dapat diingkari bahwa konsep demokrasi adalah bergandengan tangan dengan konsep nasionalisme atau konsep kebangsaan. Pengalaman bersama di masa lalu, dan kesanggupan hidup berdampingan bersama membangun hari-hari yang akan datang itulah yang memunculkan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Jika dikemudian hari rasa kebangsaan ini menjadi sedemikian kuat, sehingga memunculkan keinginan bersama untuk mendirikan satu negara sebagai sarana untuk tujuan-tujuan hidup tertentu, maka bangsa tersebut harus melalui proses demokratisasi untuk menyamakan persepsi serta pemikiran-pemikiran dari rakyat yang ingin mendirikan suatu negara tersebut.³⁷ Itulah awal terjadinya demokrasi di Indonesia dalam konteks kebangsaan. Soekarno mempunyai konsep yang berbeda dari pandangan Barat dalam memandang demokrasi. Secara terbuka ia mengkritik demokrasi liberal atau parlementer, Soekarno melihat demokrasi liberal sebagai suatu sistem yang diimpor dari Barat yang mengizinkan pemaksaan mayoritas atas

³⁷ Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977), hlm. 3

minoritas. Ia mengatakan bahwa masyarakat kita mencapai kata sepakat dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui musyawarah. Musyawarah adalah suatu bentuk pengambilan keputusan yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia. Keputusan diambil sesudah ada pertimbangan yang lama dan cermat. Selama golongan minoritas yang belum yakin akan suatu usul, maka musyawarah harus diteruskan, sampai akhirnya di bawah tuntunan seorang pemimpin dapatlah dicapai kata mufakat. Tata cara musyawarah untuk mufakat dengan kepemimpinannya memungkinkan semua pendapat dipertimbangkan dengan menenggang perasaan minoritas. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah sistem demokrasi terpimpin. Ia tidak setuju dengan demokrasi Barat yang menciptakan kaum borjuis atau kelas menengah yang berdampak pada kolonialisme dan imperialisme, sehingga penguasaan ada pada para borjuis.

Demokrasi yang dikehendaki Soekarno adalah demokrasi masyarakat yang timbul karena sosio-nasionalisme, yaitu yang mampu memperbaiki keadaankeadaan di dalam masyarakat. Sehingga keadaan yang kini pincang menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang celaka dan tidak ada kaum yang sengsara.³⁸ Demokrasi yang berdiri dengan kedua kakinya di dalam masyarakat, demokrasi yang tidak ingin menjadi kepentingan satu kelompok saja tapi kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga terjadi harmonisasi dan prinsip persamaan terhadap pemberlakuan peraturan

³⁸ *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta: Media Pressindo, Anggota IKAPI, 2001), hlm. 27

maupun undang-undang yang ada. Termasuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pengajaran bagi warga negara.

Metode pendidikan dan pengajaran Islam, sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.³⁹ Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar. Islam mempunyai sifat yang istimewa, yang meletakkan dasar keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme.⁴⁰ Islam mengakui hak pribadi setiap orang dalam hal melakukan aktifitas sehari-hari. Tidak ada larangan seorang mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang atau kelompok lain. Pendapat yang berbeda dalam menanggapi atau merespon sebuah permasalahan adalah kewajiban, dan untuk menyamakan persepsi tersebut Islam mengajarkan tentang musyawarah dalam berdemokrasi. Sebagaimana firman Allah SWT: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S: Asy Syuura: 38).⁴¹

Apabila mereka menghadapi suatu urusan, maka mereka agar urusan tersebut dibahas dan dipelajari bersama-sama. Rasulullah saw. Juga mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak

³⁹ Mohd. Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj., (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 5

⁴⁰ Khursyid Ahmad, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 35

⁴¹ Depag. RI, *Op. Cit*, hlm. 789

mereka bermusyawarah para sahabat dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan di sisi Allah.⁴²

Ibadah seperti shalat merupakan perintah syariah (seruan Tuhan), sedangkan persoalan musyawarah untuk mencapai mufakat adalah persoalan keduniawian (*muamalah*), dimana itu semua diserahkan pada manusia sebagai *khalifah fil ardl*. Secara teologis demokrasi didasarkan pada ajaran-ajaran al-Qur'an dan praktek historis masa Nabi dan *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Seperti mendasarkan pada al-Qur'an (3: 159) "*wa Shawirhum fi al-amr* (dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam persoalan itu) dan al-Qur'an (42: 38) "*wa amruhum syura bainahum* (yang memutuskan urusan mereka dengan musyawarah).⁴³

Prinsip demokrasi menghargai kebebasan, nilai dan martabat individu sebagai pribadi dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang menurut kodratnya. Sebab demokrasi itu pada hakekatnya terletak pada kekuatan rakyatnya.⁴⁴ Dalam pendidikan Islam sebagaimana yang telah diulas pada bab sebelumnya dipaparkan bahwa salah satu ruang lingkup pendidikan Islam adalah Lapangan hidup politik yang bertujuan agar tercipta sistem demokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai implikasi konsep nasionalisme Soekarno

⁴² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, Juz 25, hlm. 87

⁴³ Masykuri Abdillah, *Op. Cit.*, hlm. 77

⁴⁴ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), Cet. 1, hlm. 92-93

tidak berseberangan dengan ajaran Islam yang banyak mengajarkan tentang demokrasi kemasyarakatan. Akan tetapi dalam konteks pendidikan Islam demokrasi tidak mengenal siapa yang dianggap berkuasa menentukan keputusan, sementara dalam konteks demokrasi yang dikembangkan oleh Soekarno hadirnya seorang pemimpin sangat memungkinkan terjadinya keadilan dalam berdemokrasi.

6. Substansi Nasionalisme dalam Proses Pembelajaran

Dalam rangka penentuan prestise nasionalisme, maka unsur yang ada dalam nasionalisme dapat diupayakan sedemikian mungkin untuk dimasukkan dalam esensi proses belajar. Esensi tentang hal ini dapat dilihat pada perwujudan sila ketiga, Persatuan Indonesia atau sila Kebangsaan. Rujukan ini memberi makna pada sebuah konsep bahwa pendidikan pada dasarnya bersifat nasional dengan bahan baku *kebudayaan nasional dan kepribadian nasional* yang berjalan sesuai dengan tuntutan zaman. Mengingat berbagai macam unsure yang terdapat dinegara Indonesia, maka untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan :

- a. Melakukan introspeksi pada kondisi-kondisi wilayah tanah air dan bangsa sendiri.
- b. Menyimak sifat-sifat karakteristik suku-suku bangsa kita yang tersebar di ribuan pulau dan kepulauan, beserta kebutuhan langsung dan harapan mereka.
- c. Kemudian memobilisasi segenap potensi dan kekuatan kolektif bangsa.
- d. Tanpa banyak mengharapkan bantuan kolektif bangsa.
- e. Tanpa banyak mengharapkan bantuan donor dari luar.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa peran sejarah nasional secara positif akan menopang perkembangan etos kebangsaan itu. Sehingga tidak tepat ketika ada ucapan bahwa nasionalisme tidak relevan lagi bagi generasi muda, bahkan sebaliknya untuk meningkatkan *nation-building* nasionalisme kita perlu direvitalisasikan dalam segala dimensi. Dimensi disini dimaknai bahwa nasionalisme ditempatkan sebagai kultur pendidikan, kebudayaan, politik ekonomi dan relegi. Esensi yang terkandung dalam nasionalisme secara langsung maupun tidak langsung ikut mengisi suatu proses pembelajaran.

Dari beberapa analisa di atas, setidaknya terdapat kondisi yang cukup relevansi antara konsep nasionalisme Soekarno yang mempunyai kandungan pendidikan dengan beberapa prinsip, ruang lingkup serta dalam proses belajar mengajar pendidikan Islam.

Setiap warga negara terutama para pemuda dan umat Islam, baik perseorangan maupun yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan perlu membina dan memadukan semangat ini. Dengan demikian generasi muda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia ikut memikul tanggung jawab nasional untuk turut mensukseskan pembangunan demi masa depan bangsa dan negara menuju pada negeri yang elok, damai dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah "*Makanlah olehmu dari rizki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun*". (S.Q Saba: 15).

- b. Cinta tanah air dan bangsa sebagai salah satu paradigma nasionalisme Soekarno, telah menselaraskan diri terhadap konsep *hubbul wathon minal iman*.
- c. Paradigma nasionalisme Soekarno yang mengacu pada pluralisme, tidak mempersoalkan etnis dan rasial, tidak berlawanan dengan ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat: 13.
- d. Humanisme dan kasih sayang, sebagaimana misi ajaran Islam adalah rahmatal lil alamin.
- e. Upaya pembebasan untuk menuju pada kemandirian, pengenalan jati diri dan kebebasan dari keterbelungguan marginalitas, belenggu-belenggu kebodohan yang berdampak pada matinya kreatifitas maupun belenggu marginalitas. Pemberdayaan manusia merdeka adalah mengeksistensikan manusia sebagai makhluk sempurna secara empiris.

Hal ini tidak menyimpang dari orientasi pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia menjadi “Insan Kamil”. Dan masih banyak dimensi yang mempunyai nilai relevansi dengan pendidikan Islam, seperti halnya metode pendidikan dan pengajaran dalam rangka pendidikan Islam sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah meyerukan adanya persamaan prinsip dan kesempatan yang sama dalam belajar sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang.

